



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 15 (Lima Belas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Anggia Erma Rini, MKM./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
/F-PKB)
- Acara : Membahas:
1. Kajian stok ikan di WPP;
 2. Pemanfaatan sumber daya ikan di WPP dengan sistem kuota;
 3. Pengelolaan kawasan konservasi perairan beserta perizinannya; dan
 4. Benda berharga asal muasal kapal yang tenggelam.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
41 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6 dari 11 orang Anggota
 - 1) H. Sunarna, S.E., M.Hum. - Virtual
 - 2) Drs. I Made Urip, M.Si. - Virtual
 - 3) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 - 4) Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 - 5) Maria Lestari, S.Pd. - Virtual
 - 6) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. - Virtual
 2. Fraksi Partai Golongan Karya
7 dari 8 orang Anggota
 - 1) H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 - 2) Firman Soebayo, S.E., M.H. - Virtual
 - 3) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S. - Virtual

- 4) Ir. Panggah Susanto, M.M. - Virtual
- 5) Alien Mus.
- 6) Teti Rohatiningsih, S.Sos. - Virtual
- 7) Ravindra Airlangga, M.S.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
5 dari 7 orang Anggota
 - 1) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 - 2) Ir. H. T. A. Khalid, M.M. - Virtual
 - 3) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 4) Ir. Dwita Ria Gunadi, - Virtual
 - 5) Dr. Azikin Solthan, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
4 dari 6 orang Anggota
 - 1) Ir. Abdullah Tuasikal -Virtual
 - 2) Julie Sutrisno
 - 3) Yessy Melania, S.E.
 - 4) Ir. Hj. Sri Kustina -Virtual
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4 dari 6 orang Anggota
 - 1) Anggia Erma Rini, MKM/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. Muhtarom, S.Sos.
 - 3) Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.P.A. – Virtual
 - 4) Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
4 dari 5 orang Anggota
 - 1) Dr. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 - 3) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu.
 - 4) Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota
 - 1) drh. H. Slamet.
 - 2) Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 - 3) H. Johan Rosihan, S.T.
 - 4) Saadiah Uluputty, S.T. - Virtual
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
1 dari 3 orang Anggota
 - 1) Haerudin, S.Ag.,M.H.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

- 1) Ir. Endro Hermono, M.B.A.

Fraksi Partai Demokrat

- 2) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

C. Pemerintah

1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal);
2. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
3. Dr. TB Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya);
4. Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);
5. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan); dan
6. Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Sekretaris Jenderal Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
serta hadirin yang saya hormati,

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selamanya kita sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 28 Maret 2022 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada tanggal 18 Mei 2022 pada hari ini Kamis, 23 Juni 2022 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan RDP dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas: pertama, kajian stok ikan di WPP. Nanti akan berkonsentrasi di isu itu. Kemudian pemanfaatan sumber daya ikan di WPP dengan sistem kuota. Ini yang terus menjadi pertanyaan juga. Lalu kemudian pengelolaan kawasan konservasi perairan beserta perizinannya dan benda berharga asal muasal kapal yang tenggelam. Ini menjadi tema dan menjadi topik dari beberapa kali kita rapat.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI, Tata Tertib tentang Tata Tertib RDP, ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Bapak/Ibu sekalian,

RDP hari ini akan kita mulai pada pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada Pukul 13.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut: Pengantar Ketua Rapat, penjelasan para Eselon 1 terhadap agenda rapat, tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI, jawaban para Eselon 1, kesimpulan rapat dan penutup. Apakah bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Ibu/Bapak yang kami hormati,

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dikelola secara arif dan bijaksana untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk sebesar-besarnya kemampuan, kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita ketahui bahwa wilayah laut Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan. keamanan di mana merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional.

Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan langkah-langkah tindakan preventif dan perbaikan tata kelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan sejak dini. Hal ini agar sejalan dengan amanat dan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam *Roadmap* rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah khususnya untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun terkait dengan pelaksanaan pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) DPR RI melalui forum antar parlemen berkomitmen ingin meningkatkan pemahaman kepada para Anggotanya dalam mendorong

pencapaian PBB di konstituennya masing-masing. Ini telah diperkuat oleh pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59/2017 dimana mengharapkan SDGs menjadi pondasi yang kuat untuk struktur dan mekanisme tata kelola secara nasional.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong dan mendukung upaya pemerintah pusat maupun daerah mempromosikan secara masif konsep perlindungan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan pendekatan kepastian hukum dan sosial kemasyarakatan melalui pembinaan dan pendampingan serta pemberdayaan masyarakat ataupun kemitraan dengan swasta dalam filantropi secara efektif, efisien dan akuntabel guna menjaga keseimbangan ekosistem dan generasi yang akan datang.

Kalau kita lihat yang namanya kelestarian ekosistem tidak hanya kita sudah mengetahui semua ya, Pak Sekjen bahwa tidak hanya di darat bahkan di laut menjadi kekayaan yang luar biasa. Belum, belum mampu saya me apa mengungkapkan betapa kayanya betapa indahnya, betapa beragamnya bumi kita terutama di laut dalam konteks ini sangking banyaknya, sangking indahnya dan itu tanggung jawab kita bersama tentunya, tanggung jawab kita sebagai warga negara, tanggung jawab kita sebagai duta Tuhan yang ada di bumi. Kita ini duta Tuhan yang ada di bumi yang memang punya tugas untuk menjaga apalagi punya kewenangan dengan kebijakan baik itu di kementerian kami di DPR RI di Komisi IV juga punya kewenangan punya, punya alat untuk menjaga kelestarian menjaga bumi itu dengan dengan sebaik-baiknya.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Demikian pengantar yang saya sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan Pak Sekjen dengan para Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan secara rinci terkait hal-hal tersebut di atas.

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo bhuddaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang pertama puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan Rahmat-Nya kita sehat dan mudah-mudahan selalu sehat sehingga kita pagi ini juga bisa menghadiri Rapat Dengar Pendapat yang akan membahas tentang stok ikan di WPP, pemanfaatan sumber daya ikan dengan sistem kuota, pengelolaan kawasan konservasi perairan beserta perizinannya dan benda berharga asal muasal kapal yang tenggelam.

Ibu Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Pelaksanaan kajian stok sumber daya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP dilaksanakan oleh Komnas Kajiskan yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.

Dalam pelaksanaannya Komnas Kajiskan menggunakan data *sheet* yang dianalisis untuk menghasilkan sembilan kelompok jenis ikan per WPP. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan per kelompok jenis ikan per WPP dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan per kelompok jenis ikan per WPP. Hasil dari Komnas Kajiskan tersebut KKP memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan yang ada di 11 WPP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022.

Sesuai dengan keputusan menteri tersebut, total estimasi potensi sumber daya ikan di 11 WPP sebanyak 12,01 juta ton per tahun dengan JTB 8,6 juta ton per tahun yang terbagi dalam sembilan kelompok sumber daya ikan yaitu ikan demersal, ikan karang, peladis kecil, cumi, udang, painaik, lobster, rajungan kepiting dan pelagis besar.

Ibu Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Kami ingin menyampaikan bahwa Indonesia saat ini adalah anggota panel tingkat tinggi ekonomi kelautan berkelanjutan. Keanggotaan ini memungkinkan Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan di lautan kita. Untuk itu, kami memandang ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan lompatan besar reformasi pengelolaan perikanan di Indonesia yaitu mengubah pendekatan *input* kontrol menjadi pendekatan *output* kontrol di mana pengendalian dilakukan dengan menerapkan sistem kuota penangkapan ikan dan zonasi sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat sesuai dengan daya dukungnya. Berbagai dampak positifnya antara lain stok ikan dan kesehatan laut akan terjaga, akurasi data penangkapan dan kemudahan dalam ketelusuran tumbuhnya usaha baru yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan PNBK dan meratanya

pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

Pembagian zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota akan dibagi dalam enam zona dimana diperuntukkan untuk nelayan lokal, industri dan zona terbatas untuk pemijahan dan area pengasuhan ikan. Sedangkan pembagian kuota terdiri dari kuota untuk nelayan, kuota bukan untuk tujuan komersil dan kuota untuk industri.

Adapun detail kuota penangkapan ikan untuk nelayan lokal dan untuk industri menurut kelompok sumber daya ikan per WPP dan proses bisnis penangkapan ikan terukur sebagaimana tertera pada bahan yang kami sampaikan. Untuk lokasi pelabuhan pendaratan hasil tangkapan telah ditetapkan 19 pelabuhan untuk melayani zona industri dan 12 pelabuhan di zona nelayan lokal. Peluang usaha di setiap zona yang akan menjadi efek pengganda antara lain dari tenaga kerja, industri galangan kapal, industri perikanan seperti unit pengolahan ikan dan sistem rantai dingin, BBM dan air bersih. Implementasi dari penangkapan terukur juga akan diawasi oleh sistem pengawasan yang terintegrasi berbasis teknologi. Di samping itu, pengawasan akan dilakukan sejak sebelum laut, saat melaut, saat melakukan pendaratan hingga setelah mendarat.

Ibu Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV,

Penataan ruang laut secara berkelanjutan menjadi instrumen yang sangat penting untuk mendorong pembangunan di wilayah pesisir dan laut melalui pengembangan ekonomi biru yang implementasinya menitikberatkan pada pertimbangan ekologi, sosial dan ekonomi untuk aktivitas yang menetap di ruang laut. Rencana tata ruang laut merupakan instrumen dasar bagi perizinan seluruh aktivitas pembangunan yang dilakukan di ruang laut.

Pemanfaatan ruang laut Indonesia harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang telah diturunkan dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Dalam Permen KP tersebut juga diatur mengenai proses pemberian persetujuan KKPRL yang dilaksanakan melalui OSS.

Ibu Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2020. Total luas kawasan konservasi hingga tahun 2021 telah mencapai 28,4 juta hektar atau sekitar 8,74% dari luas perairan Indonesia.

Isu dan tantangan pengelolaan kawasan konservasi antara lain masih ada kawasan konservasi perairan yang pengelolaannya berada di KLHK. Unit cost per hektar pengelolaan kawasan konservasi masih rendah dibandingkan dengan angka ideal dan pengelolaan kawasan konservasi perairan saat ini masih *government* sentris, belum ada kewenangan pemberian pengelolaan

kepada pihak lain. Kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi seperti penangkapan ikan, budidaya, wisata alam perairan dan sebagainya.

Jenis perizinan di kawasan konservasi meliputi perizinan untuk aktivitas dan berusaha. Untuk perizinan berusaha masuk dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yaitu kawasan alam lainnya dengan nama izin yaitu surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi. Untuk perizinan aktivitas di dalam kawasan konservasi akan terkait dengan kegiatan wisata perairan, pendidikan dan penelitian.

Terkait dengan benda berharga muatan asal kapal yang tenggelam atau BMKT dapat kami laporkan bahwa terdapat seribu, kami ulangi terdapat seribu titik lokasi yang terdata di PP Nomor 32 Tahun 2017 dan memerlukan verifikasi sekitar 12, ulangi sekitar 12% dari jumlah tersebut telah diverifikasi koordinatnya dan 10% telah dieksplorasi diangkat 88% belum diverifikasi dan potensial untuk dieksplorasi. Melalui mekanisme perizinan berusaha diperkirakan 15 sampai 30% lokasi BMKT berpotensi dikembangkan untuk wisata kapal tenggelam, sebagai set museum, pemerintah pengelolaan 250.000 buah, PMKP yang telah diangkat.

Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan Perikanan terdapat potensi dan nilai pemasukan dari pengelolaan BMKT. Selanjutnya terkait BMKT, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data PP Nomor 31 Tahun 2017 terdapat seribu titik lokasi dengan rata-rata nilai per lokasi adalah 2,2 juta dolar, 2,2 juta Dolar Amerika.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMKT telah diajukan rancangan Perpres tentang pengelolaan BMKT yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemanfaatan serta penyelesaian status BMKT yang telah diangkat. Rancangan Perpres tersebut telah disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan. Selanjutnya KKP juga telah menyusun rencana kerja pengelolaan BMKT mulai dari penyelesaian status, pemanfaatan BMN, pemanfaatan *In Situ* dan perizinan berusaha pengangkatan BMKT.

Ibu Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat ini. Seluruh saran, masukan, rekomendasi dari Komisi IV akan menjadi bahan acuan bagi perbaikan kami.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak Sekjen.

Untuk isu stok di stok ikan WPP mau diperdalam lagi atau bagaimana? Langsung, langsung ke Anggota saja Pak Dirjen enggak bicara? Langsung saja oke deh. Baik terima kasih untuk paparannya Pak Sekjen.

Ada beberapa isu terutama untuk isu konservasi memang menjadi *concern* kami, Pak Sekjen karena kami di Komisi IV sudah ya karena sudah sampai ke Baleg tentang Rancangan Undang-Undang Konservasi itu dan banyak hal termasuk tentunya termasuk konservasi di areal laut lah itu menjadi apa menjadi, menjadi perhatian kami juga. Dan kita coba simulasi sekarang prosesnya sudah lagi di harmonisasi ya Pak yang di Baleg Pak Kanjeng Darori dan kita butuh diskusi lebih detail juga tentang ini karena cara pandang yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda meskipun tujuannya sama kadang juga itu menjadi menjadi agak tidak ketemu begitu. Cara pandang konservasi yang menyeluruh atau terpisah-pisah itu menjadi, menjadi isu tersendiri terutama rancangan undang-undang yang kami usulan.

Selanjutnya saya persilakan para Anggota untuk memberikan tanggapannya dimulai dari Pak Azikin Solthan demi Indonesia Raya, kebangkita Indonesia Raya.

Silakan.

F-P. GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Sekretaris Jenderal dan pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sama kami hormati,

Sehubungan dengan pembahasan materi rapat hari ini perkenankan kami Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan sebagai berikut. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 1. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Dirjen terkait terdapat beberapa data kajian stok ikan yang sama pada tahun 2017 Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 dan 2022 Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 misalnya pada WPP NRI 718. Apa metode yang digunakan oleh KKP sehingga hasil kajian dalam rentang waktu lima tahun tetap hasilnya sama.

Dua, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Dirjen terkait Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 dimana semua Wilayah Penangkapan Perikanan atau WPP kelompok jenis ikan berwarna merah atau *over exploration* dan kuning (*moderate exploration*).

Mengapa KKP masih berupaya menggenjot hasil tangkapan tetapi tidak melakukan perbaikan terlebih dahulu di wilayah tersebut kemudian baru kita lakukan penangkapan tersebut.

Tiga, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Dirjen terkait mengapa data ikan tuna tidak masuk atau dikeluarkan dari kajian ini dan apakah pada kajian ini juga sudah memperhitungkan nelayan skala kecil secara komprehensif. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan seyogyanya memiliki *Roadmap* penggunaan sumber daya ikan yang pro ke nelayan dan lingkungan yang berkelanjutan yang dapat menjadi acuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pembangunan kelautan perikanan.

Fraksi Partai Gerindra meminta kepada KKP untuk dapat menjelaskan secara detail tentang strategi penyelamatan sumber daya laut dalam pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap mengingat cakupan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat luas. Namun, belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggarannya. Misalnya modernisasi kapal nelayan yang belum signifikan dan ketersediaan BBM untuk nelayan yang masih bermasalah.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kami meminta untuk meningkatkan sosialisasi kepada nelayan tentang lintas batas perairan mengingat beberapa tahun terakhir ini cukup banyak nelayan-nelayan tradisional ditangkap oleh aparat negara lain akibat melakukan pelanggaran lintas batas negara. Kami menganggap hal ini sangat penting sebagai upaya KKP dalam membina dan membantu nelayan Indonesia agar terhindar dari masalah tersebut sehingga kehidupan mereka tidak terganggu.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, kami meminta untuk mengurangi impor pakan dengan mengalokasikan anggaran pembangunan pabrik pakan ikan agar tidak tergantung dengan pakan impor sebagai upaya mendukung kuota stok perikanan yang telah dijalankan oleh KKP. Ini juga hal yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden jangan impor, impor, impor terus.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terkait pengelolaan benda berharga muatan kapal tenggelam, kami meminta agar BMKT dikelola secara serius dan transparan tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomis tetapi juga mengedepankan nilai sejarah dan budaya sebagai objek pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Selain itu, kami meminta penjelasan seperti apa langkah Dirjen PRL KKP dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan BMKT terutama akan melibatkan investor asing dan bagaimana pengawasannya.

Yang terakhir Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terkait dengan kewenangan terbaru KKP yaitu memberikan sertifikat kelayakan kapal yang awalnya di Kementerian Perhubungan. Kami meminta agar KKP memastikan standar operasional pelayanan atau SOP yang jelas agar nelayan tidak terlalu lama menunggu dan harus jemput bola. PPSDM harus mengusahakan mental-mental petugas KKP sebagai pelayan masyarakat dan mengedepankan *good governance* atau tata kelola

pemerintahan yang baik yang indikatornya transparansi, partisipasi dan akuntabel.

Demikian yang kami dapat sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Azikin.

Selanjutnya Ibu Julie.

F-P. NASDEM (JULIE SUTRISNO):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dengan teman-teman dari Komisi IV, Pak Sekjen, Pak Dirjen dengan jajarannya,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, Fraksi Partai Nasdem akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah Fraksi Partai Nasdem mendukung penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi sumber daya perikanan Indonesia. Untuk itu, pembangunan infrastruktur pendukung perlu segera direalisasikan. Fraksi Partai Nasdem mendorong KKP dalam pembangunan infrastruktur pendukung mempertimbangkan potensi sumber daya ikan yang lebih besar seperti WPP NRI pada zona 3 yang meliputi: perairan Teluk Tolo, Laut Banda, Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau, Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur. Fraksi Partai Nasdem berharap pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur pendukung kebijakan penangkapan ikan terukur dan PNBK pasca produksi diprioritaskan pada wilayah tersebut.

Kedua, Fraksi Partai Nasdem mengharapkan kepentingan nelayan lokal terakomodasi dalam kebijakan penangkapan ikan terukur. Pada data pembagian zona dan sistem kuota yang disajikan KKP, kami melihat pada WPP NRI 718 yang memiliki potensi sumber daya ikan yang paling besar dengan estimasi 2,6 juta ton tetapi kuota untuk nelayan lokal justru paling kecil yaitu 519.000 ton. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan kuota industri yang sebesar 2 juta ton. Fraksi Partai Nasdem mendorong KKP untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan nelayan lokal dalam penetapan sistem kuota. Dukungan berupa bantuan armada dan alat tangkap yang memadai serta pendampingan koperasi nelayan dan kemudahan perizinan

perlu untuk ditingkatkan sehingga nelayan lokal dapat merasakan dampak ekonomi dari kebijakan penangkapan ikan terukur.

Yang terakhir, Fraksi Partai Nasdem mengharapkan peningkatan potensi ekonomi dari kebijakan penangkapan ikan terukur diikuti dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan melalui penerapan sistem yang memadai untuk melakukan pengawasan aktivitas penangkapan ikan berjalan sesuai dengan zona dan kuota yang telah ditetapkan sehingga keberlanjutan sumber daya perikanan tetap terjaga. Fraksi Partai Nasdem mendorong KKP terus meningkatkan aktivitas pengawasan dan penegakan hukum terutama pada wilayah yang sering terjadi praktik IUU *Fishing*. Nanti yang lain aspirasi kami akan lampirkan dan kami akan berikan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih Ibu Julie.

Silakan Bang Salim.

F-P. GERINDRA (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Terima kasih Ibu Pimpinan yang selalu menyendiri tanpa didampingi oleh Pimpinan yang lain.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Sekjen dan teman-teman yang kami hormati,
Bapak/Ibu Anggota Komisi IV,

Kami dari Fraksi Golkar tidak banyak berkomentar Pak Sekjen karena apa yang Bapak sajikan sesuai dengan keinginan kami. Pak Sekjen ini paham ya Bu. Namun, ada beberapa hal masalah pengelolaan kawasan konservasi Pak. Dari A sampai G Taman Nasional Laut itu, saya kira ini agak bertentangan berebutan dengan LHK Pak. LHK juga mengakui itu wewenang LHK sementara KKP juga mengatakan itu wewenang KKP. Ini harus jelas dimana tugas KKP dan di mana tugas LHK.

Sudah itu dalam sajian Bapak pengelolaan kawasan konservasi perairan saat ini masih *government* sentris. Contoh di Maluku seperti Sasi dan di Aceh Panglima Laut sebab kalau di Aceh juga Panglima Laut ini kan sangat berperan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memang di bawah garis kemiskinan. Kami juga berharap kepada mitra kami Kementerian KKP, sajian-sajian ini bentuknya bagus Insya Allah hasilnya juga di lapangan bagus. Kami yakin dengan Pak Sekjen yang sudah berpengalaman Pak cuman di KKP

Bapak kurang berpengalaman ilmu yang dari asal Bapak itu Bapak terapkan sebab sini sudah dua saya tengok Pak Jenderal ini Pak yang ujung yang tengah cuma Pak Didi bukan Jenderal. Beliau pensiunan, Pak.

Saya kira hal-hal yang lain kami juga apresiasi penangkapan-penangkapan kapal ikan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari KKP. Kenapa Ibu Susi dulu berani menangkap dan menenggelamkan. Hari ini kalau memang utuh sudah kita tangkap, kalau tidak bermanfaat langsung saja ditenggelamkan karena baru-baru ini ada juga Pak pelaut Aceh 17 yang ditangkap di Thailand, 17 pelaut ini mudah-mudahan dapat penyelesaian dengan bantuan Pemerintah Republik Indonesia.

Saya kira itu saja Bu. Kami dari Fraksi Golkar tidak banyak meminta Bu cuman sangat berharap sesuai dengan apa yang kita sepakati.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Bang Salim ini bijaksana sekali, tidak banyak meminta tetapi sangat mengharapkan sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya, nanti Pak Sekjen tentang konservasi ini menjadi saya ulangi lagi tadi sudah saya sampaikan juga di awal ini menjadi apa menjadi *concern* kita karena antara LHK kemudian KKP ini jadi harus sama ini nya cara tujuannya kemudian cara berpikirnya supaya tidak tidak ada keributanlah kira-kira begitu dan ekosistem terjaga dengan baik. Jangan sampai kita ribut-ribut tapi ternyata ekosistemnya tidak terjaga dengan baik. Silakan. Ini kok ini lagi Golkar lagi.

Selanjutnya Pak drh. Slamet. Tidak ada PMK kalau teman-teman di KKP.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bukan Bu maksudnya Pak Salim tidak ada penyakit mulut banyak omong. Kita harus paham dengan Pak Salim.

Baik.

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ibu Ketua yang saya hormati,

Rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati, mudah-mudahan selalu sehat,
Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh teman-teman yang dari KKP yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu sehat,

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan menyambung pembicaraan tadi pagi Pak obrolan kita tentang Kajiskan. Ternyata setelah saya buka-buka Kajiskan itu ini juga bagi kita teman-teman Kajiskan, Komisi Kajiskan itu sebelumnya ada di undang-undang apa kemudian oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu di drop sehingga kedudukannya ada di PP. Nah, ini mungkin nanti perlu kenapa ini sama-sama Komnas nanti posisinya tidak dinaikkan ini menjadi mungkin kesepakatan antara Komisi IV dan KKP yang kemudian perlu dimasukkan lagi saya pikir di bawah undang-undang supaya jelas. Kalau komisi-komisi yang lain komisioner apa nasional yang lain kan luar biasa posisinya untuk kelautan kita sementara negara kita kan negara dengan kekayaan laut yang luar biasa sementara apa regulasinya untuk Komnas Kajiskan hanya ada di SK Menteri sehingga ini nanti konflik kepentingan.

Yang berikutnya, saya ingin memastikan ini Pak Sekjen yang sering kita diskusikan terkait dengan penangkapan ikan terukur. Kita sudah ramai sudah ini terus mendiskusikan. Pertanyaan saya, kira-kira investornya sudah ada belum. Ini juga menjadi pertanyaan mendasar. Jangan sampai kemudian kita tanya terus diskusikan terus ujung-ujungnya sampai 2024 selesai Pemilu lagi ganti rezim ternyata konsep ini mangkrak karena tidak ada investornya. Ini menjadi penting saya pikir ya, jadi untuk apa kita kaji ini itu ternyata kemudian yang mau melakukan investasi di sini enggak ada sehingga PNBP yang kemudian digadang-gadang disampaikan ditargetkan menjadi sebuah mimpi buruk begitu ya tidak sekedar mimpi indah tetapi menjadi mimpi buruk. Ini mohon, mohon penjelasan dari ini karena 2024 sudah dekat Pak ya jadi tahapan Pilpres dan Pileg ini sudah mulai begitu ya sehingga harus dipastikan dan ini menjadi reputasi Pak Menteri loh ya. Kalau sampai kemudian akhir rezim tidak berjalan apa yang sudah dipaparkan di kita dengan FGD dan lain-lain tidak ada yang tertarik untuk kemudian berinvestasi di sini.

Yang berikutnya terkait dengan BBL ini Pak agak keluar sedikit tapi saya pikir ini juga menjadi permasalahan. Janjinya dulu ketika dilarang untuk diekspor begitu ya kan akan di apa tetap penangkap yang nelayan penangkap BBL itu akan tetap dibolehkan akan dibudidayakan di dalam negeri. Tetap di lapangan penyelundupan itu ada karena memang ini urusan perut Pak ya jadi kita semua paham. Kalau sudah urusan perut legal, ilegal itu kan bagi pemerintah, bagi mereka yang penting makan sehingga sudah sampai sejauh mana persiapan-persiapan untuk tetap masyarakat kita rakyat kita penangkap BBL ini legal, tenang, aman dan persiapan budidaya di dalam negeri juga sudah sampai mana.

Yang berikutnya, saya tetap mengaitkan dengan PMK ini mohon izin Pak Salim dan Bu Ketua. Jadi justru dengan kejadian PMK penyakit mulut dan kuku ini saya yakin ya dengan turunnya produksi susu, kemudian juga daging semakin apa semakin stoknya akan berkurang dipenuhi dengan impor, gizi anak-anak kita ini akan mengawatirkan. Jadi dengan suplai susu yang nanti

100% saya yakin 100% ya dengan kasus PMK ini saya mendapatkan masukan sampai di 80% turunnya produksi dari para peternak susu kita.

Nah, saya ingin mendapatkan gambaran untuk mengambil alih ini apa *stunting* ini menjadi program yang memang serius bagi pemerintahan Pak Jokowi sehingga kalau kemudian PMK ini tidak segera tertangani maka tampaknya KKP harus kemudian bisa mengambil alih terpenuhinya gizi, terselesaikannya *stunting* yang ada di masyarakat kita sehingga saya ingin mendapatkan gambaran target-target angka apa konsumsi ikan itu kan juga masih rendah di kita. Nah, ini bagaimana nanti langkah-langkah ini untuk menjadi dimanfaatkan sebagai antisipasi untuk kemudian memenuhi gizi dari anak-anak kita kedepan sehingga *stunting* bisa menjadi tanggung jawab khususnya dari KKP.

Mungkin itu Bu Ketua sedikit yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Pak Sekjen atas perhatiannya.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

KETUA RAPATI

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Slamet.

Saya menggarisbawahi tentang pencapaian PNBK Pak Sekjen. Jadi dari mulai awal tahun ini atau awal bahkan ketika Pak Menteri dilantik itu menjadi apa *goals* yang, *goal* yang akan dicapai oleh kabinetnya oleh Pak Menteri. Nah, sejauh ini sejauh ini sampai di mana perkembangannya itu perlu. Saya setuju Pak Slamet jadi harus detail begitu sejauh ini perkembangannya seperti apa karena kita juga belum pernah tanya ya. Kita belum pernah tanya tentang misalnya investornya siapa, terus kemudian bagaimana lalu perkembangannya. Pernah rapat yang lalu ada capaian berapa persen begitu dari 12 triliun ya kan seingat saya dari 12 triliun itu baru berapa persen yang tercapai. Nah, itu kita butuh, butuh mengetahui tentang perkembangan itu.

Selanjutnya silakan Pak Sutrisno dari Fraksi PDIP. Eh di mana tadi ada, oh oke. Jangan enggak boleh bermanuver ya. Pak Edward silakan.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Terima kasih Bu Ketua.

Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi IV,
Bapak Sekjen Perikanan dan jajarannya ,

Terima kasih banyak pagi ini kita masih bisa berkumpul walaupun belum manuver tapi saya sampaikan salam sehat dan tetap semangat, membela yang benar jadi manuvernya harus membela yang benar jangan membela yang sudah enggak usah dilanjutkan.

Jadi begini kita ngomong tentang potensi alam yang dikandung di lautan Indonesia ini maka terbitlah aturan-aturan kementerian undang-undang dan lain sebagainya. Sekarang yang kita persoal yang lagi tren dibicarakan ini yaitu penangkapan terukur sementara di satu sisi kita mengejar PNBK. Ini sebenarnya dua sasaran yang bertentangan tapi oke nanti kita minta penjelasan dari KKP yang satu untuk melindungi kekayaan alam kita supaya jangan tangkap ngawur jadi bibit-bibit ikan apa semua juga ditangkap satu-kaligus. Terakhir 10, 20 tahun lagi kita hanya lihat batu karang saja di laut nanti.

Jadi yang kita tekankan bahwa prinsip dari penangkapan terukur itu sejauh mungkin atau sedapat mungkin tidak boleh mengorbankan nelayan-nelayan kecil atau nelayan tradisional. Tolong dikaji secara baik jadi harus *multiplier effect*. Jangan hanya melihat kelestarian tapi yang menikmati itu adalah pengusaha atau nelayan-nelayan besar. Ini harus kita kaji secara baik karena saat sekarang juga nelayan-nelayan tradisional dan nelayan-nelayan kecil sering mengeluh karena wilayah penangkapan ikannya dibatasi.

Baru-baru kemarin kami menemui nelayan dari pantai utara Pantai Tegal, Rembang mana lagi itu dari DKI juga. Mereka mengeluhkan karena WPP-nya itu sangat sempit, memang mereka minta kalau bisa WPP-nya minimal dua tapi yang berdekatan. Memang sudah diizinkan dua tapi sekali melaut katanya, katanya mereka maka saya ingin klarifikasi. Kalau waktu mereka melaut izinnya hanya dikeluarkan satu walaupun secara teori mereka dapat dua. Jadi waktu melaut itu hanya mendapat izinnya hanya untuk satu WPP apa wilayah penangkapannya itu hanya satu. Jadi kalau mau berikutnya nanti kemudian lagi izinnya dikeluarkan. Yang mereka minta kalau bisa pada waktu mereka melaut itu mereka dikasih wilayah penangkapannya itu sekaligus dua karena kalau di wilayah penangkapan satu ikannya tidak, tidak banyaklah kurang mereka bisa langsung bergeser ke WPP 2. Ini yang saya mau klarifikasi dan mau menyampaikan supaya bisa diberi alasannya karena mereka menunggu ini.

Yang kedua bahwa akhir-akhir ini izin mendapatkan apa keabsahan perahu-perahu nelayan itu agak dipersulit karena alasan kuota. Apakah benar memang kalau izin-izin untuk kapal penangkap ikan itu saat sekarang berdasarkan kuota. Jadi ada sekian banyak yang tidak diberikan izin alasannya kuota, itu pertanyaan yang kedua.

Jadi yang ketiga itu salah satunya walaupun bukan di di Komisi kita ya menyangkut BBM. Ini mungkin bisa berkoordinasi dengan Komisi VII atau berapa soal BBM yang sekarang yang mereka dapat itu bukan BBM subsidi lagi, rata semua itu BBM-nya BBM tanpa subsidi harganya Rp16.000,- per liter. Apa betul ini, ini masukan dari mereka jadi perlu sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi atau penyampaian dari para nelayan jadi tinggal dari

Bapak-bapak dari KKP untuk bisa memberikan penjelasan yang berdasarkan aturan atau undang-undanglah. Jadi ada landasannya yang kuat jadi itu kewajiban kami untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

Yang berikut lagi mengenai perikanan tangkap walaupun akhir-akhir ini agak menurun tapi dari sektor perikanan budidaya lagi gencar-gencarnya menaikkan produksi perikanan yaitu di sektor budidaya. Tentu dengan peningkatan produksi budidaya dan perikanan pada umumnya harus diimbangi juga dengan produksi pengolahan ikan sehingga bisa memacu perkembangan di sektor perikanan, mendatangkan nilai tambah ya salah satunya PNBP itu. Jadi kita harapkan agar perhatian dari KKP bisa meningkatkan selain budidaya dan tangkap dan juga produksinya, produksi olah bahan olahan dari perikanan. Jadi itu salah satu yang kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan alternatif ini apalagi sekarang lagi penyakit kuku dan mulut.

Jadi sektor perikanan ini bisa mengambil alih dari peran penyediaan protein, selain hewani sekarang lagi penyakit kita ambil dari ikan. Mudah-mudahan dari KKP bisa menyiapkan alternatif ini karena itu pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dengan perkembangannya poin berikutnya dengan perkembangannya dunia yang punya teknologi tinggi, jumlah penduduk bertambah maka kegiatan di laut sangat mencemari lingkungan, lingkungan di daerah laut. Jadi ini apa yang akan dilakukan oleh KKP dalam mengantisipasi limbah-limbah laut yang sekarang ada. Misalnya limbah minyak, bahan-bahan rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Pencemaran lingkungan ini yang kita persoalkan jadi dari KKP kita minta supaya ada tindak lanjut danantisipasi akan hal-hal ini.

Berikutnya kerusakan ekosistem sesuai penelitian sesuai kajian dari perguruan tinggi dan lain-lain itu. Itu terumbu karang kita di Indonesia ini, itu mengalami kerusakan yang luar biasa. Jadi terumbu karang yang masih sehat itu sekitar 5,32% kurang lebih lah angka ini kadang-kadang naik turun jadi berkisar sekitar 5%-an dan ini setelah dilakukan penelitian observasi itu sudah mengalami apa penurunan kualitas terumbu karang itu mengalami gangguan sekitar 30%. Untuk itu, sebagai kementerian yang, yang memiliki kewenangan selain lingkungan hidup dan KKP bagaimana untuk mengantisipasinya tentang kerusakan terumbu karang ini. Jadi kami harapkan supaya penanganannya bisa serius dan kami Komisi IV selalu mengikuti dan mempelajari apa-apa yang dilakukan oleh kementerian sebagai mitra, mitra usaha atau mitra kerja kita ya. Peraturan kementerian sesungguhnya baik tapi perlu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai mereka merasa bahwa mereka ditinggalkan.

Yang satu lagi mengenai pelanggaran WPP, pelanggaran. Mereka beralasan dari mana kita mengetahui bahwa kita telah melanggar batas-batas WPP itu. Ini yang saya juga bukan orang teknik jadi saya bilang, wah nanti saya tanya dulu itu kementerian caranya bagaimana karena di Kementerian KKP bisa melihat di apa monitor ya cuma cara memperingati, cara memperingati nelayan itu mereka tidak tahu. PMS, PMS itu hanya hubungan antara KKP dengan nelayan eh dengan kapal yang berlayar di laut. Jadi posisinya di mana tapi nelayan tidak tahu kalau dia sudah melanggar zonanya, zona

penangkapannya. Jadi ini tolong kita pecahkan sehingga jangan sampai mereka ditanya dan kami kan tidak mengerti ini apa PMS ini. Kalau itu baik saya juga tidak mengerti jadi saya tanya saja pada orang yang mengerti nanti. Jadi tolong dijelaskan ya Bapak-bapak yang dari KKP sehingga kami sebagai wakil rakyat tidak terjebak dalam penjelasan yang salah. Jadi kami juga tidak mau salah tapi kami cari orang pintarnya. Ini Bapak-bapak orang pintar jadi terima kasih banyak ini yang bisa kami dari Fraksi PKB menyampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa mengatasi atau bisa memecahkan permasalahan yang terjadi.

Satu lagi Pak, mereka nelayan dari Jawa tangkapnya sampai perbatasan Kalimantan. Kapal mereka dibakar di Natuna juga dibakar. Jadi maksudnya ada penjaga pantai atau penjaga keamanan di laut supaya kalau terjadi konflik atau apa bisa dicari jalan tengahnya. Mereka berharap demikian ada pengertian antara para nelayan sehingga nanti kita ngomong sama KKP sehingga bisa difasilitasi kesalahpahaman di laut.

Terima kasih banyak Ibu Ketua dan dari KKP. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat.

Shalom.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Edward.

Pak Edward enggak tanya tentang ikan yang remaja, yang bayi, sudah aman ya. Sudah aman Pak TB sudah aman, sudah beranjak dewasa berarti sekarang ya.

Silakan Pak Dhevy Bijak.

F-P. DEMOKRAT (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati, dan Tentu saya bangga dari Kementerian KKP dalam hal ini Pak Sekjen beserta seluruh jajaran yang sempat hadir yang saya hormati dan yang saya bangga

Terkait dengan penyampaian beberapa teman tadi tentu kami pun dari Fraksi Demokrat juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Namun. karena memang secara substansi tadi sudah banyak yang tersampaikan oleh teman-teman, oleh karena itu saya singkat-singkat saja pertanyaannya.

Yang pertama berdasarkan dengan data yang dikeluarkan oleh KKP per 22 Juni 2022 terdapat 6.190 unit jumlah surat izin kapal penangkapan ikan atau CV di atas 30 GT yang melalui izin pusat. Didominasi oleh kapal-kapal berukuran 61 sampai 100 GT dengan jumlah 2.120 unit. Kapal berukuran 31

sampai 60 GT sebanyak 1.896 unit dan kapal berukuran 101 sampai 150 GT sebanyak 1.303 unit. Yang menjadi pertanyaan kami apakah KKP telah mendata jumlah kapasitas kapal penangkapan ikan yang ada di seluruh Indonesia baik izin pusat maupun izin daerah. Dan berapa jumlah unit dan ukuran kapal yang dibutuhkan untuk optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya ikan yang ada di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Yang kedua, terkait dengan ujung tombak dari penangkapan ikan terukur sebagai implementasi *blue economy* adalah pengembangan kampung nelayan maju di setiap penangkapan terukur di WPP NRI. Yang menjadi pertanyaan kami dari Fraksi Partai Demokrat seperti apa konsep, model dan aturan di dalam kampung nelayan maju yang dikembangkan ini dan kemudian ada berapa jumlah kapal di pesisir pantai Indonesia yang berpotensi menjadi kampung nelayan maju. Berapa jumlah kampung nelayan maju yang akan dikembangkan dan kemudian berapa kampung nelayan maju apakah hanya bersumber dari APBN atau ada sumber lain.

Kemudian yang ketiga, keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur sistem informasi teknologi dan transformasi digital melalui satelit serta pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat juga menanyakan sejauh mana KKP mempersiapkan hal ini.

Selanjutnya yang keempat seperti, seperti apa strategi pengawalan kapal ikan setelah melakukan penangkapan terukur baik oleh kapal nelayan maupun kapal industri. Kemudian tindakan apa yang akan diberikan KKP jika ada pelanggaran peraturan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan data Komnas Kajiskan potensi lestari perikanan tangkap pada tahun 2021 eh tahun 2017 sebesar 12,54 juta ton dan menurut, dan menurun sekitar 500.000 ton sehingga potensi lestari perikanan tangkap pada tahun 2022 menjadi sebesar 12,1 juta ton. Bagaimana penurunan potensi lestari perikanan ini bisa terjadi dan kemudian apa kira-kira penyebab sehingga penurunan itu bisa terjadi.

Selanjutnya, salah satu *multiplier effect* ekonomi dari bisnis penangkapan ikan terukur adalah industri pengelolaan ikan. Dampak dari kegiatan industri pengelolaan ikan adalah banyaknya limbah perikanan yang mencemari lingkungan, menimbulkan bau busuk dan mengganggu kesehatan manusia. Menurut IPB dari setiap produksi industri pengelolaan ikan 35% menjadi limbah perikanan artinya jika limbah perikanan tidak dikelola dengan baik maka masalah baru akan muncul dari industri pengolahan ikan. Kami belum melihat KKP perhatian dalam hal ini.

Terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengusulkan rancangan Peraturan Presiden tentang pengelolaan benda muatan kapal tenggelam. Sebelumnya Indonesia juga telah mengatur mengenai pengelolaan benda muatan kapal tenggelam melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda berharga Asal, Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan. Oleh karena, itu kami dari Fraksi Demokrat menanyakan sejauh mana

perkembangan rancangan Perpres yang telah dirancang dan kemudian apakah sistem bagi dengan swasta masih dipertahankan dan jika masih seperti apa model kerja sama bagi hasilnya.

Itu saja Pimpinan yang kami dapat sampaikan, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon dimaafkan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Kami maafkan. Belum-belum sudah minta maaf.

Terakhir dari Fraksi Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Pimpinan. Kita lagi (*suara tidak jelas*)

KETUA RAPAT:

Maaf ya lagi makan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Pimpinan yang terhormat,
Anggota yang terhormat,
Pak Sekjen beserta Eselon 1 KKP yang terhormat,

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Sampurasun.*

Pak Sekjen yang pertama kami ini kemarin pernah WA Rapat Banggar kita biro-biro lain KKP enggak bisa hadir dan enggak ada yang hadir. Saya juga heran ya di Rapat Besar Banggar begitu kok enggak hadir. Hebat KKP. Bukan, waktu kita rapat kemarin di Banggar. Tadi kan ini jadi karena waktu itu yang hadir semua Biro Perencanaan, itu bukan Dirjen ya karena ada beberapa kali rapat, tiga kali rapat dan saya kasih foto ke Pak Sekjen. Saya kirim fotonya ke Pak Sekjen mana biro-biro lain KKP enggak hadir. Kan kita bisa mengkoordinasikan karena kita juga butuh dorongan butuh segala macam dari sisi prosesnya dan memang yang terpenting karena di juga keputusan uang ya yang kita butuh ya deh.

Yang kedua, Pak Sekjen dari Dirjen Tangkap, aku mau mengingatkan ya karena kita-kita ini sudah mengusulkan apa namanya perahu kecil ya. Saya ingin tanya memang ada yang melarang Pak Zaeni enggak ya atas aspirasi teman-teman untuk perahu kecil. Jawab dulu deh. Apa ada yang orang di sini di Komisi IV yang melarang enggak boleh kapal kecil. Saya minta jawaban

sekarang saja. Ini sudah dua kali 2, 3 kali penganggaran teman-teman meminta ini enggak pernah didengar.

Begitu Pak Zaeni, kita ini disumpah membela Dapil, pembangunan Dapil baik sesuai mitra ataupun yang lain. Kalau ada satu Anggota yang coba-coba menghalangi oh dia sudah melanggar dan kita bisa memberikan mosi tidak percaya kalau dia Pimpinan. Kalau Anggota sebagai Anggota kita harus ingatkan karena melanggar Tatib. Makanya dari situ saya sudah dengar berapa kali teman-teman mengajukan kapal-kapal kecil karena memang nelayan butuh keadilan tapi enggak pernah ada realisasi tidak pernah didengar. Bahkan, dicuekin. Kalau itu kita bisa bersatu ganti Zaeni karena enggak mau bermitra dengan kita, tidak aspiratif karena kita ini kan memutuskan anggaran bersama-sama secara legal formal kita ini di sini tugas untuk anggaran. Bapak mewakili Presiden dengan Pak Menteri.

Nah, ini kebetulan dicatat dan diingatkan, saya ingin ngomong itu tapi saya lupa terus tapi saya mumpung saya ingat saya ingatkan hari ini. Kalau pun ada dari antara kita Komisi IV yang melarang itu kita bisa saling mengingatkan karena itu dia melanggar. Orang kita disumpah demi Allah untuk membela Dapil. Sumpah atas nama keyakinan yang paling tinggi yang ada dalam spiritualisme kita ini.

Juga catatan ke Pak Zaeni dan saya juga saya ingin memahami sebenarnya bahwa beban Bapak juga sangat berat dan bukan hanya beban kemitraan dengan kita yang secara politik tidak terlalu besar dengan kita tapi mungkin ada dengan beberapa orang kemitraan secara politis sangat berat dan saya yakin Pak Sekjen memahami dan mengerti itu makanya susah untuk menjawab saya tentang kapal ketinting, kapal-kapal kecil ini.

Yang selanjutnya ada di kejadian begini Pak Sekjen di kampung saya ini di daerah Ranca Buaya ada bus dawa namanya ya pengepul benur dari nelayan-nelayan kita yang 24 jam di lautan kapal-kapal kecil itu. Kalau Pak Sekjen nanti ke selatan nanti naik ke bukit malam hari lihat rakyat kita sedang menangkap benur dan itu diizinkan oleh apa Kementerian KKP. Syaratnya tidak boleh ekspor. Pada saat ekspor tidak boleh artinya kan mereka yang menangkap benur pada pengepulnya dituduh semua mereka adalah pemasok untuk ekspor dan mereka ditangkap oleh Polairud Jawa Barat. Mereka ditahan jadi ada risiko besar di situ. Belum tentu tuduhannya ekspornya itu terbukti tapi penangkapannya sudah terjadi dan sudah berapa bulan ini terjadi seperti ini.

Saya ingin begini kalau itu peraturan mau dibuat secara baik harus ada hilirnya. Maka saya ingin dengan Dirjen Budidaya Pak kan TB ini bagaimana caranya ada hilir untuk pengembangan benur itu. Bisa di daerah situ mereka didorong untuk apa budidaya lobster rakyat. Ya memang bisa bekerjasama dengan mereka, mereka buat kolamnya kita tinggal benih dan pakannya kan dibanding dengan apa namanya markas peng apa pangan apa lobster, *shrimp* (*suara tidak jelas*) yang mahal luar biasa kerja sama dengan mereka juga lebih luar biasa. Silakan dari ujung Cianjur sampai ujung Garut yang daerah Sancang sana, malam hari kayak pasar laut. Mereka menangkap benur Pak Sekjen. Jadi

itu rakyat kita bukan siapa-siapa mereka bukan orang Vietnam di sana itu. Kalau orang Vietnam itu di Natuna banyaknya, yang di sana lah rakyat kita.

Saya ingin dan berharap agar persoalan-persoalan yang seperti itu ada hilirnya yang baik. Per hari ini di Garut Selatan kumpul Kadis semua dan UPTD-nya memikirkan tentang bagaimana hilirnya benur ini karena akan selalu jadi masalah dengan kepolisian dituduh mereka mengekspor, mengekspor padahal belum tentu. Berarti harus ada hilirnya, harus ada harus ada tempat bagaimana budidaya lobster itu didorong dan diperhatikan oleh kita. Kita punya ada keberpihakan. Nah, itu yang terpenting Pak TB dari sisi kemitraan kita dengan mereka. Kita itu kan enggak tahu mereka itu ribuan orang bisa di situ dan kita bisa lihat dan kita bisa kerja sama bisa kemitraan saya yakin itu dari Sukabumi sampai Jawa itu penangkap benur kayak begitu.

Yang selanjutnya Pak Sekjen ada berapa hal yang memang dari sisi kebijakan kelautan kita ya hari ini mungkin kan sudah RDP sudah teknis jadi kita lebih punya ruang di sisi kepentingan kemitraan kita. Bimtek kita memang hari ini sangat rendah dan terlambat. Sudah begitu ada Bimtek mengurusnya masing-masing diurus KKP. Kenapa kita enggak kemitraan diurus kita saja diurus staf kita di lapangan karena berbeda budaya kita di Garut dengan yang di Aceh.

Kita berapa di Pertanian diurus sama orang oleh kayak kita kemitraan dengan satu Dirjen. Orang mereka enggak tahu budaya di kita. Kita enggak mau acara kering kerontang enggak ada silat kan sambil merawat kebinekaan kita khasanah kejayaan kita tentang budaya-budaya kita. Ini plot dari Jakarta mengurus begini, susah acara itu seperti kita bukan acara yang ramah dengan masyarakat banyak itu. Harusnya kan bisa menyapa secara kejiwaan dengan mereka. Saya ingin ingatkan kemitraan itu dibangun secara baik. Jangan di lapangan kayak, kayak kita ini seperti jadi dosen biasa. Nah, untuk itu tentu teman-teman semua juga semangat untuk ini sama Insya Allah akan sama.

Yang terakhir, Pak Sekjen Bailakil Pak Zaeni saya ingin ingatkan dan kawasan ruang laut yang ada di Jawa Barat Selatan mohon untuk lebih cepat diinventarisir agar tidak hilang karena kondisinya apa ya mereka ini masyarakat kita itu kan masyarakat yang bukan tidak tahu tapi wataknya itu orang itu kalau membiarkan ruang itu dibiarkan pasti diambil dan itu susah diurus nanti kembali. Contoh banyak juga perkebunan, perhutanan dan yang lain juga sama seperti awalnya. Yang paling terakhir Pak Zaeni mohon diingatkan ya pemecah-pemecah gelombang yang gagal total itu.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih Kang Haerudin.

Untuk mesin apa kapal ketinting memang sering ya kita sudah diskusikan dan memang 2022 itu adanya di DAK. Untuk 2023 kemarin kita sudah diskusikan dan sudah siap untuk 2023. Kang Haerudin langsung dengar ya nanti langsung dijawab juga sudah tanda tangan juga. Terima kasih.

Selanjutnya Pak Hermanto. Prof silakan, kali ini minta berapa menit.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bu Ketua, Pimpinan, Anggota IV,
Sekjen KKP bersama jajaran,

Pertama saya ingin menyampaikan bila Pak Salim tadi tidak meminta ya jatahnya supaya jatahnya dipindahkan saja ke Sumatera Barat ya. Setuju Pak Salim ya jangan berharap-harap Pak Salim. Jadi jangan metafor terus Pak Salim konkret begitu minta begitu loh jelas. Ini kan soalnya perjuangan Dapil itu. Yang jelas saja enggak jelas kata Pak Kyai itu.

Kemudian saya ingin menyampaikan terkait dengan program-program yang berbasis masyarakat Pak Sekjen dan Bu Sekjen semuanya. Ini supaya diseriusi terutama terkait dengan soal bantuan-bantuan ya seperti: Bioflok, benih, ikan dan lain sebagainya itu betul-betul dipastikan bahwa barang yang tiba di lokasi diterima oleh kelompok itu adalah barang yang hidup. Jangan sampai ini saya berulang kali minta yang berapa kali saya bicara ini. Jangan sampai bibit itu benih itu sampai di kolam itu separuhnya mati itu. Saat saya berkunjung di Malalo Tanah Datar di pinggiran Danau Singkarak itu, itu bantuannya banyak rupa ya petani peternak budidaya ikan menyampaikan terima kasih kepada Kementerian cuma memang ada komplain di situ ya kan. Komplainnya itu adalah separuh dari pada benihnya itu mati kan begitu. Dari ribuan hanya tinggal 200, nah itu kan kasihan begitu kan mereka kan. Nah, ini saya ingatkan lagi bahwa mohon tolong bantuan-bantuan seperti itu dipastikan bahwa benih itu adalah benih yang sehat. Jangan benih yang apa seperti: uget-uget begitu loh ya kan, uget-uget itu uget-uget itu yang kecil, kecil, calon nyamuk. Itu susah dikontrolnya Bu ya kan dia di apa dihembus oleh air saja itu sudah hanyut enggak kelihatan ke mana. Jadi agak apa agak besaran sedikit lah sehingga pembudidaya itu sangat apa sangat bersemangat. Kita juga ingin menumbuhkan semangat pembudidaya ya supaya dia itu punya ekspektasi terhadap apa yang dia terima dari negara ini begitu loh dari pemerintah ini.

Kemudian terkait dengan soal ruang laut ya konservasi laut itu. Ini saya mohon juga supaya ada kejelasan ya di mana titik-titik konservasi itu daerah mana saja ya kan. Nah, sehingga kami pun juga bisa melaksanakan fungsi pengawasan ya kan dan juga kalau ada program-program yang bersifat masyarakat itu pun juga Anggota Itu juga harus diberikan informasinya bahwa di sini adalah ruang konservasi, di sini ruang konservasi, di sini ruang konservasi sehingga kita itu bisa memberikan advokasi bila terjadi *problem* apa

itu kan nanti kan kita bisa di lapangan ini Anggota Dewan ini Komisi IV ini separuh waktu dari minggunya itu ada di Dapil, Pak Sekjen ya. Jadi tiga hari ini rapat ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah di Dapil begitu sampai Hari Minggu begitu loh.

Nah, ini Anggota Komisi IV ini betul-betul apa memantau ya nah cuma kalau tidak ada informasi dari kementerian bahwa di titik sini ada ini, ada ini, ada ini itu kita juga sulit memberikan advokasi atau pemantauan ya kan sehingga kita tidak tahu perkembangannya kayak apa begitu. Nah, bila mungkin ini kami minta supaya bantuan-bantuan dari kementerian bersifat berbasis masyarakat itu perlu kami tahu begitu loh. Jangan hanya kami diberitahu atau begini jangan saja kami ini tahu hanya program yang disalurkan kepada masyarakat yang berbasis masyarakat itu saja sehingga kita hanya mengontrol itu saja begitu sehingga tidak ada progresnya kayak apa di luar itu untuk kita bisa pantau begitu.

Nah, ini juga misalnya ya ada bantuan-bantuan kapal itu kan yang di atas 20 GT 30 GT itu enggak bisa kita kontrol di mana barang itu karena apa? karena barang itu ya dari kementerian langsung ke Provinsi begitu kan. Nah, kita enggak tahu di mana itu barang ya sehingga kita tidak mengetahui barang ini dipakai atau enggak, optimal atau tidak begitu kan sebab kami dengar ini keluhannya juga banyak juga begitu kan keluhannya banyak juga. Nah, tapi bagaimana cara kami harus bisa menyampaikan keluhan ini pun juga kan kami juga harus tahu di mana titiknya, di mana begitu kan soalnya terjadi juga penangkapan-penangkapan bukan hanya soal kapal tapi juga zona tangkapnya itu juga bermasalah juga di antara mereka begitu. Nah, itu juga harus kita tata sedemikian rupa ya kan. Ini juga kami harus tahu juga begitu kan.

Nah, kemudian juga terkait dengan persoalan kapal nelayan kapal kecil ya untuk nelayan. Ini pun juga memang harus diperhatikan biasanya isunya adalah kapal ketinting ya kan. Nah, termasuk juga jangan hanya kapalnya saja tapi alat tangkapnya juga ya kan, alat tangkapnya juga. Beberapa waktu yang lalu program ini kan kami melihat ya kan penyerahan alat tangkap ini, itu terkait dengan program ukurannya juga ya kan ukuran, ukuran mata pancingnya ya kan. Nah, ini pun juga jadi *problem* bagi mereka karena ya maklum lah ini kan namanya nelayan ruang tangkapnya itu kan hanya 1, 2 mil begitu kan. Nah, kemudian ukuran dari pada mata pancingnya ini pun juga jadi persoalan juga bagi mereka begitu cuma mereka ya bersyukur juga karena dapat alat tangkap yang begitu ya kan.

Kami juga mengapresiasi bantuan-bantuan semacam ini. Kalau bisa ini diperbanyak begitu, Pak bantuan-bantuan alat tangkap ini karena saya kemarin itu meninjau langsung nelayan yang menggunting-gunting alat penangkap apa jaringnya ini yang putus-putus itu kemudian di apa dirangkai kembali oleh nah ini pun juga mendapat perhatian juga oleh kita mestinya.

Demikian Pak Bu Ketua, Pak Sekjen, Pak Dirjen baik tangkap maupun juga pembudidaya maupun juga terkait dengan laut ya kemarin di Pasaman itu ruang laut sudah memberikan bantuan ya kan terkait dengan apa alat renang

alat kemudian juga itu jangan hanya di Pasaman jadi juga di daerah yang lain pun juga di Sumatera Barat ya di Padang, Pesisir begitu kan. Demikian.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih.

Ibu Alien silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinanku yang cantik walaupun sendiri tetap semangat.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Yang saya hormati Pimpinan saya, Bapak, Ibu Anggota Komisi IV, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen dan Ibu Dirjen Eselon 1 yang saya muliakan,

Insyallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin ya rabbal'amin.

Pertama saya mau menyampaikan bahwa kita diperhadapkan kembali dengan situasi Covid yang tidak menentu. Tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi dan situasi para nelayan kita baik nelayan yang tingkat besar kecil tapi ini adalah tanggung jawab kita. Pak Sekjen kita enggak tahu mungkin ada lagi *Automatic Adjustment* yang kesekian kali tapi setidaknya di tahun 2023 kita harus memprioritaskan atau mem-*preprare* anggaran apabila adanya *Automatic Adjustment* atau pemotongan anggaran di kemudian hari, pertama.

Kedua saya ingin menyampaikan Pak, Pak Sekjen bahwa kemarin sudah ada kesepakatan bersama dan tidak perlu lagi saya bahas tapi tentunya kita harus melihat bagaimana kebutuhan KKP di 2023. Anggaran tentunya kita butuh tapi prioritas anggaran terhadap per Eselon Dirjen 1 ini penting sekali. Kenapa tidak? Karena dengan anggaran yang terbatas terus saya masih melihat program-program yang terbagi di seluruh Dirjen ini masih belum kena dan tepat sasaran Pak Sekjen. Kita punya Dirjen Budidaya, kita punya Dirjen Tangkap, kita punya Dirjen PRL, kita punya PSDKP, kita punya daya saing. Dari beberapa Dirjen yang saya pikir ada untuk kita melihat *priority* anggaran pasti Pak Sekjen sudah tahu beberapa Dirjen-dirjen ini yang perlu kita tingkatkan anggarannya karena tepat langsung ke masyarakat nelayan.

Kemudian untuk Dirjen Tangkap, Pak Zaeni terima kasih yang bantuan yang dijanjikan oleh Ketua Komisi IV di Provinsi Maluku Utara sudah sampai dan Insyallah besok Pak Sekjen, saya akan membagikan langsung ke tiga

daerah. Tapi saya mau sampaikan Pak Dirjen memang beberapa daerah memang beda-beda situasi dan kondisinya. Ada yang membutuhkan ketinting betul, ada yang membutuhkan kapal 5 GT ke atas memang betul tapi setahu saya kalau ketinting itu masuk ke dalam menu DAK, betul kan kayak begitu? Kalau memang seperti itu bantulah para Anggota yang memiliki daerah-daerah membutuhkan ketinting lewat DAK. Enggak perlu lagi kita paksa di sini karena memang menunya ndak ada dan kita enggak boleh paksakan juga.

Kemudian saya kemarin sempat menyampaikan dalam Rapat Kerja untuk sandaran kapal kecil pelabuhan. Tolong ini menjadi atensi bagi Dirjen Tangkap karena ada kalau kapal-kapal kecil ketinting atau 5 GT dia enggak bisa sandar di pelabuhan-pelabuhan besar, kasihan. Kita harus pikirkan yang kayak begitu dan ini saya pikir ini hampir 54 Anggota yang tidak memiliki laut yang yang tidak memiliki laut mungkin enggak butuh tapi yang memiliki laut pasti butuh apalagi di daerah-daerah pesisir. Tolong ini juga diprioritaskan.

Pak Sekjen, *cold storage portable* kami butuh. Kami butuh benih yang betul-betul sumbernya bagus. Kalau memang kemarin sempat disinggung soal besaran incinya per ikan itu kalau bisalah misalnya kalau di Kalimantan budidayanya benihnya dari Kalimantan. Kalau di Sumatera benihnya dari Sumatera. Jangan lagi kayak kita di Maluku Utara sana. Kita ambil dari Ambon dari Maluku dari Manado *Alhamdulillah* sampai di tempat ya dari seribu tinggal 100 orang sudah mabuk mati. Jadi ini yang harus kita ini. Ya mungkin kan balai-balai ya jadi ini mungkin ini harus diperhatikan.

Kemudian untuk rumput laut, saya sudah sampaikan berulang kali ini juga menjadi atensi bagi para nelayan apabila mereka tidak bisa mancing, mereka enggak bisa tangkap ikan, rumput laut juga harganya sangat menjamin dan banyak sekali ibu-ibu itu kan juga terlibat dalam rumput laut itu jadi tolonglah di ini. Kalau untuk tangkap banyak sekali halnya tapi saya ndak perlu lagi sampaikan spesifikasinya paling Pak Sekjen sudah pahamlah enggak perlu kita bahas di sini.

Intinya adalah dengan anggaran yang terbatas dan Insya Allah dapat anggaran lagi tolong diprioritaskan anggarannya kepada nelayan-nelayan kecil dan memang terbagi kepada Dirjen-dirjen Eselon I sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran ke nelayan. Enggak mau panjang lebar Bu Ketua karena kita saya harus ingatkan lagi kita bahas tentang UU 590 Pak Sekjen karena di situ ada PRL. Saya ingatkan terus karena Komisi IV ini sayang ini begitu Pak Darori kepada KKP tapi kalau memang enggak bisa lagi ya sudah tidak ada lagi tuh mau bicara tentang terumbu karang, tidak ada lagi mau bicara tentang penataan ruang laut.

Saya kemarin sempat ketemu dengan Komisi VII Pak dan Komisi VII menanyakan tentang aturan KKP untuk pasir laut dan penambangan Migas ya yang ada di laut. Saya bilang sampai sekarang kita berharap sesuai dengan fungsinya KKP yang menangani laut itu berarti semuanya harus ada perizinan di laut walaupun itu berhubungan dengan Minerba. Ini kita harus dorong nih Pak dan ini harus jadi atensi. Mereka ternyata terhalang di situ. Mereka bilang,

wah ini bahaya juga ini. Kalau seandainya tidak dikunci dengan peraturan terus hanya berdasarkan surat, surat dan surat suatu saat juga ini percuma.

PSDKP misalkan, Bapak pasti sekarang sudah enggak keliling lagi ini kan, sudah habis anggarannya kan, sudah habis kan? Kita masih masih punya 40 hari. Jangan salah kalau *illegal fishing* itu terjadi di mana-mana. Jangan salah. Di mana lagi BBM naik kita mau subsidi BBM nelayan tapi ya beginilah lagi. Saya mohon Pak Sekjen anggaran yang 2023 ini benar-benar harus tepat sasaran dan kalau bisa di *prepare* apabila terjadi pemotongan anggaran.

Itu saja, Bu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Ibu Alien yang punya laut.

Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya ingin menambahkan sedikit mengenai, terus terang saya apresiasi konsep penangkapan ikan terukur ini. Ini optimismenya dan harapannya cukup besar ya hanya saja ada beberapa keraguan yang saya ingin pertanyakan dari Bapak. Yang pertama katakanlah di WPP 571, cumi-cumi 32.511 ton. Bagaimana cara Bapak dan metode Bapak menghitung atau mengukur ini sehingga bisa kita dapatkan potensinya ini cumi-cumi itu 32.000 ton. Alat apa yang Bapak pakai mengukur sehingga bisa meyakinkan kepada saya.

Lanjut, kebijakan penangkapan ikan terukur ini salah satunya adalah resto fish ya. Tangkap sebanyak-banyaknya kemudian PNBP dibayar duluan ya kan Pak dengan *beauty contest* tentunya, di situ kan ada *beauty contest*. Bagaimana di dalam *beauty contest* itu apakah penawaran tertinggi ada harga dasar yang diberikan atau kita melepas saja karena pada saat dia memenangkan suatu wilayah ya masuk 21 wilayah itu, kan salah satu kebijakannya adalah resto fish ya berlomba menangkap, nah ini. Dengan demikian kita perlu di dalam dalam mengatur *beauty contest* itu perlu kejelasan. Di sini tidak dilihat kriterianya untuk melakukan menentukan *beauty contest* itu.

Yang selanjutnya, salah satu yang memberikan saya harapan dan optimisme dan memberikan apresiasi adalah di dalam berapa WPP tadi ya, 6 ya atau 7 ya, 6 zona ya 6 zona itu diukur bahwa 9,9 juta ton dapat ditangkap dalam satu tahun. Kota industrinya 5,1 juta ton nilainya 240 triliun, ini PNBP yang sangat Besar Pak enggak bisa dicapai nantinya ini. Sekarang PNBP-nya perikanan berapa ya. Sekarang ada ditentukan bahwa akan dicapai 241 triliun

kemudian *multiplier effect*-nya 406 triliun. Ini, ini besar sekali. Kalau Anda bisa capai ini Anda, saya anggap sukses besar di dalam menangani perikanan. Saya khawatir jangan sampai hanya ini ninabobo saja kalau tidak jelas ukurannya yang apa namanya di dalam Anda meng-*update* data dan harapan yang diberikan kepada kami berikan kepada Presiden tentu ini juga ini. Jadi itu saya butuh penjelasan itu karena terus terang saya apresiasi karena harapan kita ke depan akan menjadi salah satu negara ya yang berkontribusi terhadap perikanan di dunia ini cukup besar kalau Anda bisa dicapai dan negara juga mendapatkan PNBPN yang cukup besar ya dan anggaran Kementerian KKP kalau hanya dengan nilai PNBPN 241 triliun kemudian dikasih 6 triliun marah kita di sini ya. Pasti kita minta 20 triliun, 30 triliun PNBPN-nya 241 triliun, *multiplier effect*-nya 406 triliun. Mau dikasih hanya 20 triliun kan tidak apa tidak imbang.

Yang terakhir mengenai kepentingan Dapil. Pak Zaeni sudah dua kali utang sama saya ini 2021, 10 kapal ya Pak ya, 10 miliar Bapak ETP-kan ke Provinsi dan kembali ke Jakarta uangnya. Kemudian 2022 Bapak ETP-kan lagi yang 4 miliar berarti sudah 14 kapal Pak ya. Tidak bisa lagi kan kembali lagi uangnya kan Pak 4 miliar itu 2022 ini. Nah, 2023 kembalikan dong Pak ya kembalikan. Caranya kalau Bapak mau TP-kan TP-kan ke Kabupaten pasti bisa dijalankan. Kalau TP-kan ke Provinsi kita kecewa lagi ini. Terakhir kemarin 100 miliar oleh Pak menteri sudah oke ya sudah Pak ya berarti kira-kira 1,8 miliar lah per Anggota. Ini kan programnya kan data ditentukan oleh Anggota melalui Kapoksinya masing-masing ya kan olehnya itulah tunggulah dari Demokrat kami akan bicara dulu dengan kami, kami akan arahkan ke mana apakah ketinting atau ke kapal atau sesuai dengan tingkat kebutuhan Dapil Pak ya.

Makasih, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak SDK.

Pak Johan setelah ini Kanjeng terakhir.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bu Ketua yang saya hormati,
Para Anggota,
Pak Sekjen, para Dirjen,

Pendalaman saja ini Pak Sekjen. Saya *concern* di tabel yang disajikanlah ya soal angka estimasi potensi SDI GT dan lain sebagainya ini. Saya ingin tanya kepastian saja Pak karena kita di Indonesia ini kan persoalan

kalau sudah bicara data ini kan suka kongkalikong ya. Saya mau tanya saja soal keabsahan dan keandalan data yang Bapak sajikan ini. Tadi sudah banyak yang ditanya bagaimana metodologinya, bagaimana cara menghitung sehingga tersaji data-data ini karena data-data ini disajikan juga tanpa satuan Pak, jadi kita enggak bisa membaca. Tolong nanti dijelaskan kepada kita satuannya apa.

Yang berikutnya, dari data ini saya melihat di semua WPP sama persoalannya dimana tingkat pemanfaatannya itu masih sangat rendah. Itu ada yang 0,3 paling tinggi cuma 1,5 itu di semua zona semua WPP. Tingkat pemanfaatannya 0,3 - 1,4- 1,2 sangat rendah sekali. Artinya pasti akan ada upaya tambahan penangkapan kan ya. Kira-kira Pak kalau ada penambahan ini mau diserahkan ke siapa, investornya asing atau dalam negeri, bagaimana modelnya teman-teman juga sudah tanya soal bagaimana tapi saya ingin kepastian saja apakah akan ada penambahan upaya penangkapan karena sangat masih sangat rendah.

Berikutnya intinya sebenarnya ini Bu Ketua ketika kita bicara tentang angka-angka apa namanya keterukuran dari penangkapan terukur ini yang menurut saya belum terukur adalah soal PNBP. Kan itu intinya kenapa ini dibuat untuk mengejar angka 12 triliun janji-janji Pak Menteri sampai 2024. Nah, kira-kira data-data ini bisa menggambarkan kepada kita berapa PNBP-nya ya. Nah, saya buka semua halaman-halaman ini tadi Bu Ketua belum ada yang mengkonversi antara angka hasil tangkapan kita itu dengan uangnya belum Rp-nya ini. Nah, kira-kira dengan potensi-potensi tangkap kita yang segini ini Bu Ketua Rp-nya berapa. 2023 kira-kira nanti pendapatan negara bukan pajak kita itu dari 12 tahun itu sampainya berapa sehingga kita tahu karena sejak awal ketika Pak Menteri berjanji Bu saya selalu bicara, Pak Menteri kami akan awasi Anda ya.

Saya akan angkat jempol ketika Pak Menteri bisa memenuhi angka, enggak usah 12 triliun deh ya enggak usah 12 triliun terlalu tinggilah menurut saya itu karena dasar kita adalah 600 miliar ya. Terpenuhi ya mungkin angka sekitar 5 atau 6 triliun saja sudah mungkin sudah cukup menurut kita ada pergerakan begitu. Nah, jadi tolong dikonversi Pak buat kami hitungan ya di Komisi IV dan kemudian nanti Banggar termasuk seperti ini disampaikan oleh Pak Suhardi Duka tadi itu kalau misalnya angkanya jelas kalau dikasih angka kita cuma 6 triliun ntar kita kasih masuk sekian misalnya, tentu kita akan bisa dorong Banggar ataupun pemerintah untuk meningkatkan anggaran perikanan kita. Nah, jadi itu saja saya Bu. Saya intinya itu bagaimana ini di-Rupiah-kan ya. Nah, karena terus terang kebijakan ini, ini kan kita sudah menghitung manfaat dan mafsadatnya Bu Ketua ya. Semua nelayan ini Pak yang ketemu sama kita minimal yang ketemu sama saya tuh menolak Pak soal sistem terukur ini tapi kalau kita misal bisa-bisa kita dikasih gambaran dari potensi tangkap kita menghasilkan sekian triliun, berarti kan ada ukuran mafsadat sama apa namanya manfaatnya itu biar kita tahu, oh penolakan kalian mungkin karena begini-begini.

Ya, yang terakhir bagaimana pengkondisian ya pada setiap WPP karena tidak semua Pak tidak semua daerah tangkapan ini nelayannya itu nelayan

besar. Kebanyakan mayoritasnya malah nelayan kecil. Nah, bagaimana pengkondisian dari nelayan-nelayan kecil kita ini untuk menerima sistem terukur ini. Dia tidak dilindas tidak kemudian dikorbankan hanya untuk mendapatkan 12 triliun yang juga belum jelas itu.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Kanjeng silakan terakhir.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bu Ketua, teman-teman Anggota,
Pak Sekjen, para Eselon I dan semua yang hadir,

Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bu Ketua soal masalah konservasi ini Pak Sekjen bahwa Undang-Undang 590 ini sekarang sudah hampir diserahkan kepada pemerintah. Nah, ini yang menyangkut dengan KKP ini perlu kenapa ini direvisi, ternyata berdasarkan jurnal IUCN itu lembaga konservasi dunia kerusakan konservasi di dunia itu Indonesia nomor 2 sekarang, nomor 1 Meksiko. Ya ,di Meksiko ada 665 spesies, di Indonesia ada 583 spesies. Nanti mungkin kenapa dan mananya kita enggak akan cerita di sini. Salah satunya yang bikin jadi perhatian di KKP yaitu jenis yang perlu diperhatikan pertama terumbu karang. Ini catatan IUCN, yang kedua ikan hiu dan ikan pari, yang ketiga udang. Saya enggak tahu kok udang dianggap sudah mulai punah ini jenis yang mana ini Pak Dirjen ya. Saya tahunya udang ya udang galah udang windu tahunya banyak sekali jenisnya di laut itu. Nah, ini jadi perhatian dan saya menarik juga bahwa Menteri KKP telah menerbitkan ikan-ikan yang dilindungi begitu ya itu berdasarkan rekomendasi dari CI Test ya kan. Nah, ini saya minta jangan terjadi peristiwa menteri yang lalu berantem dengan Menteri Kehutanan begitu akhirnya Presiden turun tangan. Tolong Pak Sekjen ini dikomunikasikan ya dengan Kementerian Kehutanan sehingga kita bisa betul-betul apa namanya kerja sama ya karena ini kalau ini dibiarkan ya kita sekarang menurut KLHK kita sudah hebat. Ini hebat naik, naik jadi nomor dua Bu Ketua. Dulu nomor 5 sekarang di nomor 2 kerusakannya di dunia itu Ini, ini bukan dari saya. Saya membaca jurnalnya.

Yang kedua juga saya memberikan saran ya seperti yang pernah kami sampaikan. PNBPNya Pak Sekjen ini kan dicari yang uang receh-receh itu yang enggak mungkin tercapai 12 triliun uang receh-receh itu. Tolong pada saat saya masih di sana kerja sama dengan Pak Sekjennya ,Pak Samsul, saya kira ingat ya, kita memberikan 8 Taman Nasional. Tolong itu dievaluasi. KLHK sekarang sudah menerima PNBPNya 5 triliun dari mana, antara lain dari wisata

laut. Bunaken, Raja Ampat, Pulau Seribu itu mestinya Anda yang mengelola nanti tapi tolong yang 8 (delapan) Taman Nasional itu dievaluasi dipresentasikan mungkin di Komisi IV atau KLHK. Ini loh yang dulu tahun 2008 diberikan kepada kami, kami sudah melaksanakan dengan baik. Tolong semua Taman Nasional Laut kami yang mengelola begitu tapi kalau enggak ada buktinya susah Pak nanti. Ini, ini yang saya nah itu bisa menerima PNBP jauh itu. Kehutanan itu subsidi pemerintah untuk APBN-nya hanya 10% lah Bapak 600% kan terbalik itu dan Bapak punya potensi PNBP yang besar.

Yang kedua mungkin Bu Ketua ini jadi kesimpulan. Saya baru membaca juga bahwa lobster yang ada di Vietnam itu 80% dari Indonesia dan selundupan semua Pak. Kita enggak bisa mengawasi. Apapun kerja sama ini terjadi karena pengawasannya itu kita masih terbelah, karantinanya itu kita enggak satu. Mestinya pertanian, kehutanan, kelautan satu komandonya Kepala Badan, Deputinya masing-masing ada di bawahnya itu ya karena orangnya ada kendaraannya ada sarana ada kenapa enggak bisa bersatu. Tidak bisa ini itu. Seperti kami di *airport* itu enggak punya ya di Kehutanan itu enggak punya karantina jadi kalau mengawasi ya kayak mondar-mandir kayak penumpang. Bagaimana mau melihat kayu cendana kayu yang lain-lain itu yang diselundupkan hasil-hasil laut dan sebagainya. Ini, ini perlulah begitu.

Saran saya kerja sama saja dengan Vietnam itu, tolong di masuk ke kesimpulan Bu 60:40 misalkan. Benur kita kirim ke sana, kirim orang tenaga ahli kita di sana belajar dijual 60% untuk Vietnam 40% untuk Indonesia. Kenapa, karena kita kalah transport Pak Vietnam ke Jepang ke Cina itu dekat. Kita ke sana sudah dua kali lipat ongkosnya tetap harganya tidak bisa. Ini kalau ini dilakukan apa kata teman kita dari NTB apa NTT ini tercapai 6 triliun. Kalau hanya 600 miliar ya mungkin ini tahun ini mungkin belum ya tapi saya kira masih ada waktu kerja sama itu kenapa mungkin negara antar negara begitu mungkin Pak Sekjen ke Vietnam melihat bagaimana kerja sama kita dengan Dirjen ke sana itu ya.

Ini pernah kami lakukan dengan Cina Pak. Kayu Gaharu itu dulu lewat Taiwan kami. Kami ke sana kita jual ke Taiwan Rp10.000,- per kilo dijual Taiwan ke China Rp20.000,- kita bisa B2B jadi dijual langsung Rp15.000,- sana untung Rp5.000,- kita naik Rp5.000,- seperti itu. Saya kira misal Pak Dirjen sekali-sekali jalan ke sana mengajak Pak Salim misalnya karena yang paham Pak Salim ini ya. Saya kira itu Bu Ketua. Jadi saya mikir bolak-balik dikoreksi PNBP-nya ya memang yang dicari receh-receh ya enggak tercapai-capai Pak Sekjen. Dua saja itu Taman Nasional untuk wisata Bunaken seperti apa. Raja Ampat seperti apa. Pulau Seribu itu turisnya luar biasa. Dari situ itu Kehutanan dapat, itu wilayah Anda sebetulnya undang-undangnya sudah ada begitu.

Saya pikir itu, Bu.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Tentang PNBP tadi di awal juga saya juga sudah saya sampaikan sama dengan Pak Bang Johan juga. Jadi kita belum mendapat, saya enggak cukup kita enggak cukup gambaran saja Bang Johan. Kita harus kita semua terutama Pak Sekjen harus mampu membuktikan bahwa memang benar ada peningkatan. Kebijakan yang sudah diambil itu benar-benar memberikan dampak yang lebih baik. Kalau misalnya dari 600 miliar menjadi 12 triliun itu ada stepnya kan enggak mungkin ujug-ujug 12 triliun kan.

Nah, dari 600 miliar terus kemudian sampai hari ini tuh berapa yang sudah ada dan bagaimana perkembangannya perjalanannya kita butuh gambaran itu dan kami sebenarnya di awal ketika Pak Menteri punya keinginan punya cita-cita 12 triliun kita sangat senang sekali sangat apresiasi karena itu harusnya memang kita bisa memaksimalkan cuma sampai hari ini pun juga belum, belum ada bukti yang bisa kita lihat bahwa ini loh merangkak untuk menuju 12 triliun itu Pak Sekjen.

Selanjutnya tentang pengawasan ini penting sekali. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Alien itu. Pengawasan ini menjadi instrumen yang paling penting bagi kita begitu banyak begitu luas dan juga beragam kekayaan laut kita, ikan kita. Kalau enggak ada pengawasan dan instrumen yang kita punya itu tidak kita maksimalkan atau kita abai bahkan ya jadi kita abai kan makanya kita butuh perlu ada tanggapan dari Pak Sekjen kira-kira seperti apa ini pengawasan yang sudah dilakukan. Apakah memang sudah muter terus untuk mengawasi atau seperti apa ya kita tahu persis uangnya atau penganggarannya tidak cukup banyak tetapi bisa enggak kita diberikan gambaran tentang apa yang dilakukan.

Saya pikir itu.

Silakan Pak Sekjen untuk merespons semua tanggapan, pertanyaan dari para Anggota. Monggo silakan.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pertama-tama kami ingin menjelaskan atau memberi angka tentang ada beberapa pertanyaan termasuk Ibu Ketua tentang angka PNBP bisa ditayangkan. Jadi sampai hari ini, sampai hari ini yang sudah realisasi untuk PNBP adalah sebesar 770 ulangi Rp777.000.000.000,-

KETUA RAPAT:

Mana ya? Coba ditayangin dulu. Oke.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Untuk sampai dengan Bulan Juni ini hari ini adalah Rp771.000.000.000,-
Jadi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu tahun lalu sampai akhir tahun
hanya 708 miliar jadi sudah lewat dari bulan ke masuk ke bulan ke-7 ini sudah
kita sudah realisasi. Ini adalah baru dari optimalisasi atau pengecekan-
pengecekan dengan selektif kapal-kapal perizinan. Ini yang angka yang sudah
pasti jadi untuk target kami di tahun ini sebesar 1,9 mudah-mudahan bisa
sedangkan tahun lalu yang terealisasi satu tahun hanya 800 sampai 1 triliun
baru 1 triliun yang tahun lalu. Ini untuk realisasi PNBK KKP di tahun 2022.

Selanjutnya

KETUA RAPAT:

Maaf Pak. Jadi ini dari sebagian besar dari mana hasilnya dari?

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Dari Tangkap Bu dari Dirjen Tangkap.

KETUA RAPAT:

Dari Tangkap.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Itu sebesar 588 miliar sampai bulan Juni ini Bu.

Terima kasih Bu.

F-P... (.....) :

Bu Ketua.

Saya ingatkan janji Pak Menteri itu 12 triliun itu hanya dari Tangkap.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Betul Pak untuk 2024.

F-P... (.....) :

Hanya Tangkap.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Itu pun itu izin kami jawab 2024, itu 12 triliun yang estimasinya atau
targetnya 2024 itu pun kalau regulasinya sudah, sudah berjalan sedangkan ini
masih dalam proses semua untuk, untuk PP Tangkap itu, masih diharmonisasi

ya, baru izin pengajuan prakarsa di prakarsa baru sampai itu untuk apa dasarnya ya.

Selanjutnya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bu Ketua sedikit. Sedikit Pak Sekjen. Tadi disinggung-singgung regulasinya, regulasinya yang mana ya untuk mendukung PNBP tadi.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Untuk penangkapan ikan terukur Pak. Dulu Permen sekarang mau di yang kami ajukan soal di prakarsa dari di PP. Ya betul Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Oke Pak.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih. Terima kasih Ibu.

Selanjutnya untuk bantuan-bantuan aspirasi apa Dapil, *Alhamdulillah* sudah selesai. Ada beberapa nanti yang kami sampaikan mohon bantuannya dari para Anggota Komisi IV terutama keluhan-keluhan tentang budidaya tentang ukuran kalau boleh ini kan kita sekarang sudah maju kemajuan zaman ya kita manfaatkan. Jadi begitu datang tolong difoto begitu. Kalau memang toh apa namanya ikannya sangat kecil kurus sekali begitu kan muda sekali, tolonglah disampaikan jangan langsung di pada saat apa Raker ini kami disampaikan yang mana ya begitu ikannya nanti gampang mudah sekali itu ceklek Pak Sekjen ini digoreng saja enggak bisa begitu kan jadi peyek saja enggak bisa begitu.

Jadi mohon apa nanti kemajuan itulah tentang bantuan-bantuan nanti ya saya rasa laporannya lebih bagus cepat langsung difoto begitu biar bisa diulangi begitu kan dalam arti kalau itu sudah misalkan seratus ribu sangat kecil sekali kita kasih lagi seribu yang benar begitu. Jadi Pak TB ibarat kerja *double* begitu karena keluhannya selalu sama ini kayaknya ikannya mengecil terus begitu tapi yang mana ya. Mohonlah kita gunakan apa ilmu-ilmu kemajuan ini sekarang tinggal difoto kirim. Jadi pengaduannya tidak, tidak hanya apa kata-kata tapi berdasarkan foto seperti tadi saya sampaikan tentang PNBP langsung datanya jelas.

Selanjutnya Pak Azikin tentang tadi penangkapan ikan terukur juga yaitu penangkapan ikan terukur ini di dicanangkan ya itu yang utama adalah tadi semua berhubungan dengan ekologi atau konservasi karena yang kita ketahui sampai saat ini Indonesia termasuk, kemarin saya dari Eropa ikut apa ikut konferensi di WTO yang topik utama adalah tadi betul tentang kerusakan, kerusakan habitat laut atau ekologi. Nah, sebagai jawaban dari pertanyaan

besar itu atau topik besar itu adalah penangkapan terukur. Jadi seluruh negara internasional seluruh negara di dunia sekarang sudah melakukan penangkapan terukur berupa kuota.

Jadi kuota itu tidak boleh lebih dari 60% dari yang dibolehkan ditangkap. Nah, itu untuk menjaga keberlanjutan ekologi laut karena tidak ada satu ikan pun yang KTP-nya sama. KTP-nya semua istilahnya mempunyai kewarganegaraan ganda berganda karena ikan yang ditangkap di Indonesia bukan punya kita, mungkin itu punya Alaska ataupun Australi karena mereka bermigrasi. Jadi setiap negara harus punya aturan untuk penangkapan dan ada pembatasan yaitu kuota.

Nah, untuk itu kami sangat setuju tadi sebelumnya ada disinggung atau didiskusikan tentang Kajistan. Ini kuncinya adalah Kajistannya harus betul-betul independen dan saya setuju dengan Pak Slamet kalau bisa kita tingkatkan komisi ini jangan sampai hanya ditunjuk oleh atau disahkan oleh apa tanda tangan Pak Menteri. Kita bikin betul komisi-komisi nasional karena ini bukan hal kecil masalah ekologi atau sumber daya ikan ini tidak bisa hanya ditangani oleh KKP tapi oleh keseluruhan karena milik-milik seluruh rakyat dunia bukan rakyat Indonesia saja dan untuk peningkatan PNBK sehubungan dengan apa keberlanjutan ekologi tadi Pak Darori, Pak betul Pak ini recehan Pak tapi kami itu Pak, kami harus menjaga ekologi.

Seperti kita ketahui Pak digenjotnya itu wisata Taman Laut Bunaken sekarang rusak Pak. Itu karena terlalu apa namanya wisatanya digembargemborkan internasional, dilakukanlah penyelaman terbesar di dunia segala rupa ternyata rusak. Sangat luar biasa itu kerugiannya yang didapat hanya 155 triliun tapi yang kerugiannya itu kalau dihitung dengan apa kerugian jangka panjang luar biasa. Luar biasa rugi kita. Jadi angka itu enggak ada gunanya dengan kerusakan.

Untuk kita ketahui terumbu karang ini tumbuhnya itu hanya 3 centi maksimal per tahun, per tahun itu. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang Raja Ampat terbatas tidak jadi dibikin mahal sajalah sekalian, dibikin mahal sekali datang silakan menyelam mahal tapi harganya mahal sekali. Itu orang-orang kaya bangga saja orang-orang kaya tapi kalau orang-orang semua bisa ke sana rusak. Jadi betul kata Pak Slamet tentang tadi Pak Slamet mungkin yang menyampaikan bahwasannya kita adalah nomor 2 peringkatnya dalam kerusakan apa, Pak Darori Pak ya. Kerusakan itu Pak salah satunya adalah tidak dibatasinya tentang taman laut untuk dinikmati dalam rangka wisata apa kita meningkatkan wisata dengan kualitas diturunkan kuantitas di apa diutamakan. Jadi lebih bagus sekarang orang-orang tertentu saja lah yang mau datang kalau enggak ya lihat filmnya saja lah daripada rusak apa ekologi kita.

Selanjutnya, untuk mendukung penangkapan ikan terukur juga memang yang kami akui yaitu tentang penerangan atau sosialisasi kepada masyarakat belum sampai ke masyarakat nelayan kecil Pak. Jadi tolong Pak Dirjen Tangkap dan ke semuanya bukan hanya Dirjen Tangkap ini apa sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti bahwasannya penangkapan ikan terukur ini sudah merupakan kebijakan internasional dalam rangka

membatasi, dalam angka membatasi jumlah yang boleh ditangkap. Lalu pembagian zona termasuk zona untuk pembesaran, pembiakan dan pemijahan itu harus ditentukan dan itu juga kami setuju dengan Pak Slamet tadi masukannya untuk Kajistan memang harus yang betul-betul independen, berkualitas dan mungkin bisa melibatkan lebih banyak lagi elemen-elemen di dalamnya.

Selanjutnya harapan pembangunan prioritas wilayah untuk nelayan tradisional di untuk apa kampung-kampung nelayan. Ada 120 untuk tahun ini 120 kampung nelayan. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada secara tertulis kepada Anggota dan untuk apa untuk jawaban tertulis, untuk, untuk penangkapan ikan terukur ini apakah sudah ada investornya karena beberapa kali tadi disampaikan ada beberapa pertanyaan termasuk yang berminat dalam penangkapan ikan terukur ini apa hanya omong-omong saja atau bagaimana. Nah, untuk calon investor ada sekitar 20 lebih, nanti kami akan sampaikan, saya enggak hafal siapa-siapa saja. Nanti kami sampaikan secara tertulis dan untuk penentuannya adalah dengan *beauty contest* betul. Tadi masukan dari Pak Edward kalau tidak salah akan kami sampaikan akan kami lakukan *beauty contest* yang benar-benar sesuai dengan masukan diperhitungkan segalanya tidak hanya harganya saja tapi keberlanjutannya dalam rangka ekologi menjaga ekologi.

Untuk Pak Salim untuk kawasan konservasi harus jelas tadi nanti ada mungkin keterangan dari apa jawaban dari Pak Dirjen PRL. Jangan sampai tumpang tindih antara KLH dengan, dengan KKP yang mana yang sebenarnya bertanggung jawab karena jangan sampai karena tumpang tindih mending kalau dua-duanya perhatian tapi, ah itu kan urusan KLH itu kan urusan KKP malah didiamkan itu yang sangat kita, yang sangat kita hindari.

Untuk selanjutnya KKP juga dalam rangka penangkapan ikan terukur ini akan memperhatikan tentang kearifan lokal seperti Sasi di mana di Maluku lalu Panglima Laut dan lain-lain di ada juga di mana di Sumatera Barat, Larangan itu ada sungai larangan bukan larangan apa namanya ya itu ya, ada beberapa semua wilayah rata-rata ada kearifan lokal itu juga harus diperhatikan. Jadi penangkapan ikan terukur ini akan memperhatikan hal-hal tentang kearifan lokal.

Untuk selanjutnya ini isu yang tidak pernah berhenti ini tentang BBL. Tadi Pak Haerudin dan Pak Darori juga. Ada apa bagaimana kalau kita kerja sama, betul Pak, kami masukannya luar biasa nanti kami akan rencanakan untuk kunjungan ke sana untuk kita jajaki betul kita mendingan kerjasama saja karena terus terang saja yang namanya pengawasan seperti Bu Alien Mus sampaikan waduh...

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Darori diajak.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Iya Pak Darori. Bu Alien nanti kita ini kita bicarakan ini tentang kerjasama mudah-mudahan mau. Yang kami tahu Pak mereka tidak pernah mau mengalih teknologi Pak itu luar biasa jahatnya itu. Kalau bisa enggak ada lagi kita bilang jahat lah

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bukan jahat Pak, dia pintar Pak.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Pintar jahat sadis juga lah.

KETUA RAPAT:

Kita yang kurang kita yang bodoh. Kurang belajar.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Kurang belajar Bu, kalah, kita kalah dari mereka, kita kalah. Kita kalah dari mereka itu satu kelemahan kami juga tapi siapa tahu nanti dengan kerja sama yang beberapa masukan dari Anggota mudah-mudahan bisa diterapkan sehingga BBL kita bisa maksimal kita menjadikan apa penghasilan untuk rakyat kita tidak hanya sebagai pengepul lalu ditangkap polisi dipersulit lagi. Lalu belum di jalannya banyak mati kerugian kasihan memang nelayan kita dan kita harus bela itu sampai kapan pun.

Selanjutnya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Izin Bu Ketua sedikit Pak Sekjen.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pak Slamet, saya tadi Pak Sekjen mau menjelaskan tentang pengawasan tapi sudah kepotong. Tolong deh dijawab dulu pengawasan baru

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Yang pengawasan, untuk pengawasan Bu mohon maaf. Setelah dihitung-hitung dengan kenaikan harga BBM yang semakin hari semakin mahal dan saat ini katanya antara 16 sampai 17.000 sedangkan kami menggunakan BBM dengan harga industri yaitu 17.000, jadi jumlah hari layar kami tinggal 40 hari. Oh malah sekarang 23.000 harganya jadi selain mencekik para nelayan juga sangat mencekik para pengawas untuk BBM. Jadi tidak ada jalan lain selain kami mungkin tidak mengurangi hari tapi mengurangi armada jadi kami selektif betul yang kami patroli adalah daerah-daerah yang rawan. Kalau dulu

yang agak rawan pun kami patroli yang sekarang ini yang sangat rawan yang kami hanya patroli. Ini kalau bocor juga sebetulnya para pelaku pengawasnya. Ini nya apa namanya...

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Izin Bu. Ini kapal patroli kita berapa karena saya mendapat informasi bisa dideteksi keberadaan kapal Bapak dari satelit jadi kalau Bapak ke arah timur dia pencuri arah barat betul enggak ini ceritanya seperti ini Pak?

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Yang punya satelit Pak tadi sudah disampaikan juga tentang bagaimana pengawasan kapal nelayan. Mereka punya GPS, sama Pak. Jadi teknologinya sama. Jadi seperti Tom dan Jerry itu Pak tapi mudah-mudahan Pak mereka lebih ahli Pak dengan cara pencegahan jadi tidak hanya satu tapi kita menggunakan taktik pencegahan. Jadi yang lari ke kiri di kiri sudah menunggu jadi kita dibagi tiga wilayah di PSDKP ini barat, timur dan tengah. Nah, itu mereka makanya bisa sebetulnya meningkatnya PNBPN ini juga itu karena penertiban para apa yang bodong-bodong begitu kan nah mereka akhirnya sadar dan yang pasti satu Pak. Kebijakan kami dalam penindakan pelanggaran untuk nelayan Negara Republik Indonesia ini Pak, nelayan kita tidak serta merta langsung dipidana atau langsung denda tapi dengan peringatan dulu. Jadi kita mengerti posisi nelayan kita yang saat ini sebenarnya sudah survive saja sudah syukurlah ya. Jadi kita tidak terlalu keras ke mereka dengan cara penangkapan lalu atau di apa ditindak atau dipidanakan. Sekarang mereka kita ingat kan dulu peringatan pertama, peringatan kedua kita lebih arif dalam penegakan hukum di apa di laut kecuali nelayan asing.

Kalau nelayan asing kami mohon maaf tidak ada ampun bagimu. Kapal nya tidak kami tenggelamkan, kami sudah bicara dengan Kejaksaan dengan pengadilan. Alangkah baiknya kapal-kapal ini tidak ditenggelamkan tapi diserahkan kepada nelayan kita yang sangat memerlukan. Mungkin itu, banyak yang belum kami jawab secara keseluruhan akan kami jawab dengan jawaban tertulis.

Terima kasih Bu Ketua.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bu Ketua sedikit.

Jadi tampaknya tadi yang semangat yang disampaikan oleh Pak Sekjen terkait dengan kerja sama tadi mungkin perlu masuk kesimpulan Bu Ketua sehingga betul-betul ada semacam perencanaan yang bagus dari KKP untuk melakukan langkah-langkah tidak sekadar. Kan begini budidaya kita juga belum jalan, kita ekspor juga masih dilarang sementara potensinya tinggi dan rakyat kita nelayan khususnya butuh makan sehingga perlu dimasukkan kesimpulan untuk membuat perencanaan bagaimana kemudian bentuk kerja sama termasuk alih teknologi sehingga nanti kita akan mendapatkan *Blueprint*

nanti akan kita tagih lagi Bu. Mudah-mudahan sih ya ini akan menjadi kado bagi Pak Sekjen Pak Menteri sebelum berakhirnya pemerintahan.

Terima kasih Bu.

KETUA RAPAT:

Ya sudah kita dalam draft sudah kita masukkan dalam yang tadi disampaikan Pak Slamet dan Pak Kanjeng. Memang menurut saya kita tidak bisa berhenti atau terima kalau kita ini bodoh ya kan. Saya pikir kita memang harus mengejar jangan sampai apa yang kita punyai itu ya terus kemudian diambil begitu. Tidak kemudian oh mereka pintar, kita bodoh selesai tidak jadi kita harus mencari termasuk terobosan-terobosan misalnya alih teknologi lalu kemudian terobosan dengan kerja sama itu kan bagian dari kita bisa strategi untuk mempertahankan yang kita punya.

Bapak/Ibu ada pertanyaan lagi? Tunggu dulu Prof. Belakang dulu, belum.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Kami ingin mendapat penjelasan sekali lagi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan bantuan kapal 5 GT yang kemarin tersandung di Provinsi dan tadi juga ditanyakan Pak Haerudin maupun Pak Suhardi Duka. Kiranya bagaimana terutama keseimbangan dengan wilayah-wilayah yang tidak mempunyai pesisir untuk perikanan darat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Hermanto sekalian.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ya ini saya kalau sudah Pak Jenderal ngomong itu saya sudah selesai lah urusan.

KETUA RAPAT:

Berarti sama ya?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Satu lagi terkait dengan ruang konservasi ya. Ini selain dari harus memastikan lokasinya juga harus memastikan jangan sampai tumpang tindih anggaran ya kan karena ini bisa juga saling klaim ya kan. Nah, ini dengan KLHK ini masih satu komisi kita Bu Menteri ya KLHK dengan Kelautan. Ini memang

perlu dari pihak kementerian harus membuat peta yang jelas ya kan di mana ruang konservasi yang menjadi wilayah kerja KKP kemudian juga di mana wilayah kerja dari KLHK kemudian juga jenis kegiatannya itu di situ seperti apa dan anggarannya pun juga. Nah, sehingga nanti kita jelas yang membedakan oh ini KLHK oh ini KKP ya kan sehingga kita tidak, menghindari tumpang tindih saja begitu.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Baik.

Pak Sekjen silakan direspons pertanyaan Pak Guntur ya.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Izin menyampaikan Pak untuk bantuan kapal, Pak. Untuk yang tahun 2023 kita jumlahnya sudah, sudah sepakat Pak jadi nanti Bapak bisa ajukan. Bisa Bapak ajukan itu jumlah besarnya Rupiahnya sudah jelas Bapak bisa apa sesuai dengan kebutuhan Bapak. Jadi mudah-mudahan kita sudah sepakat untuk jumlahnya itu Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau yang untuk yang di bawah 5 GT itu sudah disiapkan untuk 2023. Kalau 2022 ini adanya di menu DAK begitu? Sudah disepakati kalau untuk 2023 *wonten nggeh* 2022 masih di DAK ya? Masih DAK dan buku kecil.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Jadi ada satu lagi ini Bu yang daerah yang tidak punya pantai, nah itu bagaimana.

KETUA RAPAT:

Nah, daerah yang enggak punya pantai.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Nanti sesuai dengan pengajuannya, Bu.

KETUA RAPAT:

Oh, sesuai dengan pengajuan.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Jadi jumlahnya kan sudah ada apa sudah ada apa namanya sudah ada angkanya, Rupiahnya sudah ada tinggal di ini.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Itu dulu di rapat itu begitu Bu Ketua ke Anggota mungkin belum tersosialisasikan jadi angkanya sudah ada mau diajuin apa saja begitu Pak Sekjen ya. Ya, kayak tergantung kita begitu jadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

terima kasih Bapak/Ibu sekalian.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan satu lagi tidak lebih dari.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Saya pikir untuk semua yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV nanti kita akan bahas. Pak Sekjen setelah ini jangan dulu langsung pulang, makan dulu makan siang ya itu intinya makan siang dulu setelah itu biar kita korelasikan semuanya agar semua lebih jelas. Satu penekanan Pak Sekjen tolong apa namanya kemarin kita sudah disampaikan untuk rincian atau *Automatic Adjustment* yang dua kali itu ya. Tolong kan kemarin Pak Sekjen enggak hadir Pak Menteri yang hadir menjelaskan tapi masih sekilas karena begini Pak di Pertanian itu kemungkinan besar *Automatic Adjustment* dikembalikan. Dikembalikan ke Pertanian lagi kalau bisa itu pun diurus untuk dikembalikan di KKP, bisa menjadi prioritas anggaran yang PSDKP tadi yang tinggal masa hari layarnya 25 hari misalkan di Dirjen Tangkap di Dirjen-dirjen lainnya misalkan seperti itu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Bu Alien.

Jadi *Automatic Adjustment*-nya di Kementerian Pertanian memang kita minta untuk dikembalikan karena ada kasus PMK. Jadi kebutuhan yang mendesak bagi KKP itu juga menurut kami dari Komisi IV mendorong untuk bisa diminta dikembalikan lagi. Kita masuk ke kesimpulan ya Bapak/Ibu sudah mulai lapar ini.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan kalau bisa yang tadi *Automatic Adjustment* yang di KKP kita masukin kesimpulan biar menjadi ini saja.

KETUA RAPAT:

Tapi buat apa kan belum tahu buat apanya

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Prioritas anggarannya ke nelayan kecil dong sama PSDKP hari layarnya tinggal 25 hari bagaimana untuk menjaga menjaga *illegal fishing* di Indonesia kalau cuman 25 hari. Sementara kita masih ada 60 harian kali.

Terima kasih.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Bu.

Ada strategi yang enggak mungkin kami sampaikan di sini karena ini sidang terbuka. Ada strategi-strategi yang pasti satu yang kami sampaikan kami bocorkan boleh. Kami kerja sama di Perikanan, Bu. Semua kementerian atau lembaga atau siapapun yang berkepentingan dengan keamanan laut semuanya sama ininya apa kesulitannya, akhirnya kami bagi-bagi di situ Bu. Jadi bagi wilayah, bagi hari, bagi sasaran dengan misalkan dengan Bakamla, kepolisian, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat karena TNI Angkatan Darat juga ada yang diperbatasan. Semua kami lakukan koordinasi yang komprehensif dan terukur.

Terima kasih, Bu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, maaf ini kita kemarin pernah sama Bakamla, Pak Sekjen juga pasti sudah tahu persis tapi penangkapan-penangkapan kapal ikan yang ada yang *illegal fishing* setahu saya harusnya enggak bisa itu Bakamla yang tangkap harus dari PSDKP misalkan. Untuk kapal ikan-kapal ikan tangkap nih kapal ikan walaupun kita kerja sama pasti tentu iya tapi ini kan kita mau me bagaimana tugas dan fungsinya kalau memang dapat di lapangan langsung ditangkap begitu loh enggak ada proses-proses negosiasi di sana. *Sorry to say* ya mungkin saja ada *quote and quote you* lewat saja di sana, tangkap saja

keluar yang penting ini ada kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang maksud saya kita mendorong.

Terima kasih.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Bu semangatnya.

KETUA RAPAT:

Ini bagian dari dukungan kita Pak. Dari dukungan teman-teman dari Komisi IV bagaimana KKP ini giginya juga kelihatan terutama tidak hanya kelihatan tapi berasa juga begitu. Jadi pengawasan itu tidak hanya mengawasi doang mengawasi itu kalau Bahasa Jawa itu dilihat doang tetapi memang ada tindakan dan punya data terukur juga, punya data terukur terkait dengan pelanggaran-pelanggaran.

Baik, kita masuk ke kesimpulan silakan tolong ditayangkan. Bapak/Ibu, saya bacakan kesimpulan tolong diperhatikan.

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah tindakan preventif dan perbaikan tata kelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan sejak dini agar sumber daya sektor kelautan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional khususnya untuk tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals*.

Para Anggota? Pak Sekjen?

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkampanyekan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan secara optimal berdasarkan potensi lestari hasil Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan menjamin adanya kepastian hukum regulasi melalui pendekatan, pembinaan, pendampingan serta pemberdayaan masyarakat ataupun kemitraan dengan swasta secara efektif, efisien, akuntabel guna menjaga keseimbangan ekosistem dan generasi yang akan datang.

Para Anggota? Ini enggak dimasukin tentang menaikkan status dari Kajistan ya Kajiskan? Kajistan itu negara. Para Anggota? Pak Slamet tadi sempat mengangkat isu ini coba dibaca.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Bu Ketua mungkin perlu, perlu ditambah (*suara tidak jelas*) keanekaragaman hayati (*suara tidak jelas*) ini kan tadi Pak Darori ya (*suara tidak jelas*)

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Izin Pimpinan.

Ibu Endang masuk yang ini saya *concern* sama Undang-Undang KKP ini. Dia cuman berbicara tentang jenis ikan jadi kalau Komnas Kajiskan itu kalau kita masuk ekosistem hayati yang terdapat kandungan di dalam air laut dan tawar itu berarti sudah merangkap ke mana-mana ya jadi karena ini kita Komnas Kajiskan ini jadi kita fokusnya ke situ saja ikan ya.

KETUA RAPAT:

Kalau dianggap oke Pak Sekjen.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Apa tidak baiknya untuk generasi yang akan datang, ekosistem untuk generasi yang akan datang.

KETUA RAPAT:

Iya oke. Dan nya di kayaknya tetap deh berarti ya

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Enggak, enggak, keluar, keluar.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Buang?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Di *delete*, *delete*.

KETUA RAPAT:

Maksud saya tadi makanya saya tanya ke Pak Slamet tadi Pak Slamet kan sempat mengangkat bahwa Komnas Kajiskan ini kan sebenarnya unit yang sangat penting. Pak Sekjen juga sempat mengangkat juga yang hari ini tidak

punya wewenang atau bahkan enggak punya apa ya tidak independen begitu, apa enggak perlu kemudian dinaikkan statusnya karena kalau melihat kebutuhan laut Indonesia itu sangat kuat sekali, itu maksud saya begitu. Ini kalau isu ini ya saya setuju tetapi ada poin lagi tentang bagaimana kita mengangkat atau me ya menguatkan, penguatan nah penguatan kelembagaan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Penguatan kelembagaan Komnas Kajiskan cuma masalahnya tadi kan dia sekarang ada di PP, Bu sehingga harus kita kembalikan lagi ke undang-undang dan itu di Undang-Undang CK yang menghapus itu kan begitu. Mungkin bahasa umum dulu disepakati bahwa Komisi IV mendorong Kementerian KKP untuk melakukan penguatan Komnas Kajiskan dalam apa tataran regulasinya. Nanti apakah nanti mengajukan ya.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf setelah itu kan prosesnya kemudian dilakukan kan Pak Sekjen, jadi kan setelah itu di bahwa rekomendasi kita rekomendasi dari Komisi IV adalah meminta untuk menguatkan apa peran dari Kajiskan itu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Diomongin duu kan ada peraturannya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Enggak Mbak Alien. Menurut saya menjadi kesimpulan hanya untuk mendorong untuk melakukan penguatan. Saya setuju ke Bu Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat kelembagaan Kajiskan. Jadi masih umum tentang prosesnya nanti kan bisa dilanjutkan, begitu para Anggota? Pak Sekjen?

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

3. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penerbitan regulasi tentang penangkapan ikan terukur agar ada kepastian usaha di sektor kelautan perikanan sehingga proses pelayanan administrasi perizinan kapal dapat

segera diimplementasikan sesuai dengan peruntukan pembagian zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Para Anggota? Pak Sekjen?

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjajaki kerja sama dengan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak khususnya pengelolaan komoditas benih bening lobster yang mempunyai nilai ekonomis tinggi untuk mencegah adanya penyelundupan yang masih marak terjadi.

Ini yang poin yang tadi disampaikan Pak Darori. Para Anggota? Pak Sekjen?

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siap, silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Mohon maaf itu kesimpulan jangan ketok dulu. Kesimpulan harus tambah satu lagi.

KETUA RAPAT:

Oh ya ada oke apa.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tadi kita meminta Komisi IV meminta atau apa namanya bahasanya itu untuk meminta *Automatic Adjustment* yang dikenakan kepada KKP. Membuka ya apa ya namanya. Mengusulkan.

KETUA RAPAT:

Ini kan coba saya minta, minta masukan, minta masukan ke teman-teman semua terutama teman-teman Komisi IV. Jadi kan kebetulan kita rapat tidak semua Dirjen apakah tentang pengusulan untuk mencabut *Automatic Adjustment* rekomendasi kita ini dibicarakan di sini dimasukkan di sini atau bagaimana begitu. Ya, makanya kan harus ada alasannya begitu loh ada alasannya supaya kita juga enggak asal juga begitu loh. Saya tahu ada alasan sangat kuat tetapi kebetulan kan hanya Dirjen ada beberapa ya. Pak Sekjen hanya ada 2 eh 3 dong 4 dong. Pak Dirjen tidak semuanya begitu Bu Alien ada rasionalisasi yang menguatkan enggak begitu.

Silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Jadi begini, jadi begini Pimpinan. Kurang rasional apalagi kalau *illegal fishing* bisa terjadi di lapangan. Saya juga bingung ini kalau kita mau cari rasionalnya karena kalau *illegal fishing* ya sudah dan ini hasil hari layarnya cuma 25 hari bagaimana pengawasannya. Kalau kita bilang kerja sama dengan Bakamla, Angkatan Laut dan sebagainya kita punya aturan kok. Mereka enggak bisa tangkap, mereka hanya cuma menyetop tapi yang akan melakukan tindakan penangkapan dan untuk setop itu hanya di PSDKP KKP. Kami sudah bicara waktu itu sama Bakamla mereka cuma hanya kontrol makanya mereka mau kalau bisa PSDKP hilang dari KKP.

Kita minta duitnya balik saja dulu Bu intinya seperti ini karena kita butuh. KKP ini anggarannya sedikit kok. Kita usul pengembalian karena satu krusialnya adalah masa hari layar tapi enggak perlu kita masukan seperti itu. Kita butuh pengembalian *Automatic Adjustment* dari KKP yang dikenakan ke KKP dalam rangka, dalam rangka mana tadi. Coba tolong dibikin dulu biar kata-katanya kita lihat. Nanti atas persetujuan semuanya nanti mungkin dari KKP bisa tambahkan kata-katanya juga begitu.

KETUA RAPAT:

Kalau misalnya bahasanya adalah Komisi IV meminta KKP untuk mengkaji ya biar ketahuan ini dipakai buat apa secara detail begitu. Kalau menurut saya langsung ke kalau pengawasan ya pengawasan saja.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

Saya pikir tidak hanya di pengawasan saja. Kita nanti pengembaliannya nanti ada di Dirjen-dirjen terkait. Jadi begini yang terutama alasannya kita dari pengawasan kemudian nanti ke Dirjen-dirjen terkait itu saja karena kegiatan untuk prioritas ini bukan hanya di PSDKP tapi ada di PRL, Budidaya dan juga Daya Saing dan juga Tangkap misalnya seperti itu, Bu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini masih, ini masih sangat luas menurut saya. Masih sangat luas jadi harus jelas dipakai buat apa begitu loh.

Silakan, Pak Sekjen.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Usul saran masukan. Jadi kepada Kementerian Keuangan untuk dapat, untuk dapat menggunakan kembali anggaran mengembalikannya di (*suara tidak jelas*).

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, saya mohon persetujuan dari poin 5 ini.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat menggunakan kembali anggaran *Automatic Adjustment* dalam tahun 2022 dalam rangka menjalankan prioritas dan kegiatan, menjalankan program dan kegiatan prioritas.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tambahan saja. Jadi kepada Kementerian Keuangan untuk dapat menggunakan kembali anggaran *Automatic Adjustment* yang dikenakan KKP atau *Automatic Adjustment*.

KETUA RAPAT:

Sama saja sih enggak perlu itu enggak apa-apa sih. Diulangi kan di atas sudah Kementerian ini Perikanan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya, tapi kok (*suara tidak jelas*)

KETUA RAPAT:

Yang lain oke? Pak Sekjen?

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Pasti setuju dong Pak Sekjen.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian, terima kasih.

Semua proses sudah kita lalui termasuk juga kesimpulan juga sudah kita dapat. Sebelum menutup RDP ini silakan Pak Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan kata penutup untuk RDP hari ini.

Silakan, Pak Sekjen.

SEKJEN KKP RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Ibu Ketua, Wakil Ketua, para Ibu Bapak Anggota Komisi IV yang kami muliakan,

Terima kasih banyak masukan hari ini. Tadi Pak Darori apalagi kita mudah-mudahan Pak dijadi mudah-mudahan bisa memanfaatkan apa BBL ini dengan maksimal lalu bisa kita serap teknologi negara lain untuk terutama untuk kepentingan masyarakat nelayan pengepul di pantai selatan.

Demikian dari kami.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah RDP pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan semua Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memimpin dan ada kekurangan. Dengan ini, ada yang lebih ya, tidak ada kesalahan. Terima kasih.

Dengan ini saya tutup dengan membaca *Alhamdulillahirobbil'alam* dan RDP ini saya tutup.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002